

# CASCADING KINERJA DINAS PETERNAKAN PROVINSI JAWA BARAT 2016

KEPALA DINAS PETERNAKAN PROVINSI JAWA BARAT									
VISI : MENJADI AKSELERATOR PENINGKATAN PRODUKSI PETERNAKAN YANG BERDAYA SAING DAN AMAN DIKONSUMSI MASYARAKAT JAWA BARAT TAHUN 2018									
MSI 1 : Memfasilitasi peningkatan produktivitas ternak dan daya saing produk peternakan di Jawa Barat			MSI 2 : Memfasilitasi usaha peternakan yang berwawasan lingkungan di Jawa Barat			MSI 3 : Mewujudkan lingkungan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner yang kondusif di Jawa Barat			
TUJUAN 1 : Meningkatkan produksi, kualitas, keamanan dan nilai tambah produk peternakan			TUJUAN 2 : Meningkatkan usaha peternakan yang berkelanjutan			TUJUAN 3 : Terkendalinya penyakit hewan menular strategis dan zoonosa			
Sasaran 1.1. Meningkatnya produksi, dan populasi ternak			Sasaran 2.1. Meningkatnya usaha peternakan yang ekonomis			Sasaran 3.1. Terkendalinya penyakit hewan menular strategis dan zoonosa			
1.1.1.	Jumlah produksi peternakan (ton)		2.1.1	Prosentase pelaku usaha berdaya saing	10	3.1.1	Jumlah kasus penyakit Anthrax, Rabies, Avian Influenza (AI) dan Brucellosis		
-	Jumlah produksi daging	768.495	Sasaran 2.2. Terfasilitasinya kawasan usaha peternakan yang berwawasan lingkungan			-	Anthrax (kasus/tahun)		0
-	Jumlah produksi telur	217.295	2.2.1	Jumlah kawasan usaha peternakan	5	-	Rabies (kasus/tahun)		0
-	Jumlah produksi susu	268.797				-	AI (kasus/tahun)		50
						-	Brucellosis (prevalensi/ %)		3
1.1.2.	Jumlah populasi ternak (ekor)								
-	Jumlah populasi ternak sapi potong	466.272							
-	Jumlah populasi ternak sapi perah	143.774							
-	Jumlah populasi ternak kerbau	143.594							
-	Jumlah populasi ternak domba	12.285.496							
-	Jumlah populasi ternak kambing	2.477.171							
-	Jumlah populasi ternak ayam ras petelur	13.941.114							
-	Jumlah populasi ternak ayam ras pedaging	131.860.302							
-	Jumlah populasi ternak ayam buras	28.939.719							
-	Jumlah populasi ternak itik	10.307.731							
Sasaran 1.2.	Meningkatnya kualitas dan keamanan produk hewan								
1.2.1	Prosentase produk peternakan yang sesuai SNI (daging, telur, susu)								
-	Daging	65							
-	Telur	65							
-	Susu	52							
1.2.2	Jumlah unit usaha yang mendapat sertifikat/rekomendasi teknis sistem jaminan mutu	52							
Sasaran 1.3.	Meningkatnya aksesibilitas pasar hasil peternakan								
1.3.1	Jumlah unit usaha yang bisa mengakses pasar regional dan nasional	5							
1.3.2	Jumlah sarana pemasaran peternakan di kab/kota yang menerapkan standar pelayanan minimal dan SOP	5							
Sasaran 1.4.	Meningkatnya kinerja sumber daya dan kelembagaan peternakan								
1.4.1	Jumlah Kelompok yang meningkatnya usahanya	30							

KEPALA BIDANG PRODUKSI			KEPALA BIDANG PRASARANA DAN SARANA			KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN USAHA			KEPALA BIDANG KESEHATAN HEWAN DAN KESMAVET			SEKRETARIS				
1.1.1	Jumlah produksi peternakan	Prosentase peningkatan Nilai Kondisi Tubuh (NKT) (10%) (12 Kab/Kota)	1.4.1	Jumlah kelompok yang meningkatnya usahanya	( 10 Kelompok)	1.2.2	Jumlah unit usaha yang mendapat sertifikat/rekomendasi teknis sistem jaminan mutu	(7 unit)	1.1.2	Jumlah populasi ternak	5%	0.0.0	Prosentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu			
1.1.1.1	Jumlah produksi peningkatan Nilai Kondisi Tubuh (NKT)		1.4.1.1	Jumlah lokasi di kabupaten/kota yang mendapatkan fasilitas pembinaan pemanfaatan teknologi peternakan, kesehatan hewan dan kesmavet	(5 Kab/kota)	1.2.2.1	Jumlah petaku usaha yang mendapat/mengpross/menerapkan sistim jaminan mutu/GMP	(2 Orang)	1.1.2.1	Prosentase penurunan kasus penyakit hewan		5%	0.0.0	Prosentase data kepegawaian dan data aset		
1.1.1.2	Jumlah kabupaten/kota yang menerapkan Good Farming Practice (GFP), Good Breeding Practice (GBP), dan Good Feeding Practice (GFP)		1.4.1.2	Jumlah lokasi di kabupaten/kota yang mendapatkan fasilitas alat mesin peternakan, kesehatan hewan dan kesmavet	(5 Kab/Kota)	1.2.2.2	Jumlah petaku usaha pengolahan hasil peternakan yang sudah menerapkan teknologi pengolahan	(5 Orang)	1.1.2.2	Prosentase penurunan kasus gangguan reproduksi pada ternak ruminansia		5%	0.0.0	Prosentase laporan capaian kinerja dan keuangan		
1.1.2	Jumlah populasi ternak	(4 Kab/Kota) (22 Dokumen)	2.2.1	Jumlah kawasan usaha peternakan	5	1.3.1	Jumlah unit usaha yang bisa mengakses pasar regional dan nasional	(5 Unit)	1.2.1	Prosentase produk peternakan yang sesuai SNI (daging, telur, susu)	10 Kab/Kota	-				
1.1.2.1	Jumlah kabupaten/kota yang menerapkan standarisasi mutu bibit, penggunaan bibit unggul, penginjegan bibit hasil inseminasi buatan (IB), dan Embrio Transfer (ET)		2.2.1.1	Jumlah lokasi yang direkomendasikan sesuai dengan hasil kajian penataan dan pengembangan kawasan peternakan	6	1.3.1.1	Jumlah petaku usaha yang mampu menerapkan rantai pasok dari hulu sampai hilir bidang peternakan	(5 Orang)	1.2.1.1	Jumlah kabupaten/kota yang terlibat dalam kegiatan Program Monitoring and Surveillance Hewan (PMHS) dan cemaran mikroba						
1.1.2.2	Jumlah dokumen pemetaan distribusi semen boku ternak ruminansia besar di kabupaten/kota		2.2.1.2	Jumlah kabupaten/kota yang menyusun rencana aksi penataan dan pengembangan kawasan peternakan	(11 Kab/Kota)	1.3.1.2	Jumlah stake holder yang menyepakati dalam penetapan angka ketersediaan dan kebutuhan ternak dan hasil ternak	(32 stake holder)	1.2.2	Jumlah unit usaha yang mendapat sertifikat/rekomendasi teknis sistem jaminan mutu				(43 Unit)		
1.1.2.3	Produktivitas Ternak	Prosentase kelahiran ternak ruminansia besar dan ruminansia kecil, serta prosentasi produksi telur harian ternak unggas Jumlah kabupaten/kota yang dikoordinasikan dalam konservasi Sumber Daya Genetik (SDG) sapi paundan, domba garut ayam pelung dan ayam sentul Jumlah kabupaten/kota yang mengaplikasikan sistim potensi ketersediaan pakan, bahan baku pakan ternak	1.3.2	Jumlah sarana pemasaran peternakan di kab/kota yang menerapkan standar pelayanan minimal dan SOP	5%	1.3.2	Jumlah sarana pemasaran peternakan di kab/kota yang menerapkan standar pelayanan minimal dan SOP	5%	1.2.2.1	Jumlah unit usaha obat hewan yang menerapkan Cara Pembuatan Obat Hewan yang Baik (CPOHB)	(3 Unit)	-				
1.2.2	Prosentase unit usaha yang menerapkan sistim jaminan mutu peternakan		1.3.2.1	Jumlah fasilitas pemasaran peternakan kabupaten/kota dan Poktan/Gapoktan	(5 Unit)	1.3.2.1	Jumlah fasilitas pemasaran peternakan kabupaten/kota dan Poktan/Gapoktan	(5 Unit)	1.2.2.2	Jumlah unit usaha yang diujikan untuk mendapatkan rekomendasi teknis itin usaha obat hewan	(5 Unit)					
2.2.1	Jumlah unit usaha pakan ternak yang diusulkan mendapatkan rekomendasi teknis pendafataran		1.4.1	Jumlah kelompok yang meningkatnya usahanya	( 10 Kelompok)	1.3.2.1	Jumlah fasilitas pemasaran peternakan kabupaten/kota dan Poktan/Gapoktan	(5 Unit)	1.2.2.3	Jumlah unit farm unggas yang mendapat sertifikat kompetensi	(5 Unit)					
2.2.1.1	Jumlah unit usaha pakan ternak yang diusulkan mendapatkan rekomendasi teknis pendafataran	1.4.1.1	Jumlah kelompok peternakan yang mampu mendorong produktivitas dan iklim usaha	(20 Kelompok)	1.4.1	Jumlah kelompok yang meningkatnnya usahanya	( 10 Kelompok)	1.2.2.4	Jumlah unit usaha pangan asal hewan yang mendapat sertifikat Nomor Kontrol Veteriner (NKV)	(30 unit)	1.2.2.4	Jumlah unit usaha pangan asal hewan yang mendapat sertifikat Nomor Kontrol Veteriner (NKV)	(30 unit)	1.2.2.4	Jumlah unit usaha pangan asal hewan yang mendapat sertifikat Nomor Kontrol Veteriner (NKV)	(30 unit)
2.2.1.2	Jumlah unit usaha pakan ternak yang diusulkan mendapatkan rekomendasi teknis pendafataran	1.4.1.1	Jumlah kelompok peternakan yang mampu mendorong produktivitas dan iklim usaha	(20 Kelompok)	2.1.1	Prosentase petaku usaha berdaya saing	(10 Kelompok)	3.1.1	Jumlah kasus penyakit Anthrax, Rabies, Brucellosis dan Avian Influenza (AI)	(150 Kasus)	3.1.1.1	Jumlah rekomendasi tindak lanjut hasil surveillance penyakit hewan	(2 dokumen)	3.1.1.2	Cakupan vaksinasi PHMS dan zoonosa	80%
2.2.1.3	Jumlah unit usaha pakan ternak yang diusulkan mendapatkan rekomendasi teknis pendafataran	1.4.1.1	Jumlah kelompok peternakan yang mampu mendorong produktivitas dan iklim usaha	(20 Kelompok)	2.1.1.1	Jumlah petaku usaha yang mampu mengakses fasilitas usaha	(750 Orang)	3.1.1.1	Jumlah rekomendasi tindak lanjut hasil surveillance penyakit hewan	(2 dokumen)	3.1.1.2	Cakupan vaksinasi PHMS dan zoonosa	80%	3.1.1.3	Tingkat kekebalan hewan terhadap penyakit rabies, Brucellosis dan AI	60%
2.2.1.4	Jumlah unit usaha pakan ternak yang diusulkan mendapatkan rekomendasi teknis pendafataran	1.4.1.1	Jumlah kelompok peternakan yang mampu mendorong produktivitas dan iklim usaha	(20 Kelompok)	2.1.1.1	Jumlah petaku usaha yang mampu mengakses fasilitas usaha	(750 Orang)	3.1.1.2	Cakupan vaksinasi PHMS dan zoonosa	80%	3.1.1.3	Tingkat kekebalan hewan terhadap penyakit rabies, Brucellosis dan AI	60%	3.1.1.4	Jumlah kabupaten/kota yang terlibat administrasi dan terlibat teknis dalam melaksanakan lalu lintas hewan/ternak dan produk hewan antar provinsi	(25 Kab/kota)
2.2.1.5	Jumlah unit usaha pakan ternak yang diusulkan mendapatkan rekomendasi teknis pendafataran	1.4.1.1	Jumlah kelompok peternakan yang mampu mendorong produktivitas dan iklim usaha	(20 Kelompok)	2.1.1.1	Jumlah petaku usaha yang mampu mengakses fasilitas usaha	(750 Orang)	3.1.1.3	Tingkat kekebalan hewan terhadap penyakit rabies, Brucellosis dan AI	60%	3.1.1.4	Jumlah kabupaten/kota yang terlibat administrasi dan terlibat teknis dalam melaksanakan lalu lintas hewan/ternak dan produk hewan antar provinsi	(25 Kab/kota)	3.1.1.5	Jumlah kabupaten/kota yang terlibat administrasi dan terlibat teknis dalam melaksanakan lalu lintas hewan/ternak dan produk hewan antar provinsi	(25 Kab/kota)
2.2.1.6	Jumlah unit usaha pakan ternak yang diusulkan mendapatkan rekomendasi teknis pendafataran	1.4.1.1	Jumlah kelompok peternakan yang mampu mendorong produktivitas dan iklim usaha	(20 Kelompok)	2.1.1.1	Jumlah petaku usaha yang mampu mengakses fasilitas usaha	(750 Orang)	3.1.1.4	Jumlah kabupaten/kota yang terlibat administrasi dan terlibat teknis dalam melaksanakan lalu lintas hewan/ternak dan produk hewan antar provinsi	(25 Kab/kota)	3.1.1.5	Jumlah kabupaten/kota yang terlibat administrasi dan terlibat teknis dalam melaksanakan lalu lintas hewan/ternak dan produk hewan antar provinsi	(25 Kab/kota)	3.1.1.6	Jumlah kabupaten/kota yang terlibat administrasi dan terlibat teknis dalam melaksanakan lalu lintas hewan/ternak dan produk hewan antar provinsi	(25 Kab/kota)
2.2.1.7	Jumlah unit usaha pakan ternak yang diusulkan mendapatkan rekomendasi teknis pendafataran	1.4.1.1	Jumlah kelompok peternakan yang mampu mendorong produktivitas dan iklim usaha	(20 Kelompok)	2.1.1.1	Jumlah petaku usaha yang mampu mengakses fasilitas usaha	(750 Orang)	3.1.1.5	Jumlah kabupaten/kota yang terlibat administrasi dan terlibat teknis dalam melaksanakan lalu lintas hewan/ternak dan produk hewan antar provinsi	(25 Kab/kota)	3.1.1.6	Jumlah kabupaten/kota yang terlibat administrasi dan terlibat teknis dalam melaksanakan lalu lintas hewan/ternak dan produk hewan antar provinsi	(25 Kab/kota)	3.1.1.7	Jumlah kabupaten/kota yang terlibat administrasi dan terlibat teknis dalam melaksanakan lalu lintas hewan/ternak dan produk hewan antar provinsi	(25 Kab/kota)
2.2.1.8	Jumlah unit usaha pakan ternak yang diusulkan mendapatkan rekomendasi teknis pendafataran	1.4.1.1	Jumlah kelompok peternakan yang mampu mendorong produktivitas dan iklim usaha	(20 Kelompok)	2.1.1.1	Jumlah petaku usaha yang mampu mengakses fasilitas usaha	(750 Orang)	3.1.1.6	Jumlah kabupaten/kota yang terlibat administrasi dan terlibat teknis dalam melaksanakan lalu lintas hewan/ternak dan produk hewan antar provinsi	(25 Kab/kota)	3.1.1.7	Jumlah kabupaten/kota yang terlibat administrasi dan terlibat teknis dalam melaksanakan lalu lintas hewan/ternak dan produk hewan antar provinsi	(25 Kab/kota)	3.1.1.8	Jumlah kabupaten/kota yang terlibat administrasi dan terlibat teknis dalam melaksanakan lalu lintas hewan/ternak dan produk hewan antar provinsi	(25 Kab/kota)
2.2.1.9	Jumlah unit usaha pakan ternak yang diusulkan mendapatkan rekomendasi teknis pendafataran	1.4.1.1	Jumlah kelompok peternakan yang mampu mendorong produktivitas dan iklim usaha	(20 Kelompok)	2.1.1.1	Jumlah petaku usaha yang mampu mengakses fasilitas usaha	(750 Orang)	3.1.1.7	Jumlah kabupaten/kota yang terlibat administrasi dan terlibat teknis dalam melaksanakan lalu lintas hewan/ternak dan produk hewan antar provinsi	(25 Kab/kota)	3.1.1.8	Jumlah kabupaten/kota yang terlibat administrasi dan terlibat teknis dalam melaksanakan lalu lintas hewan/ternak dan produk hewan antar provinsi	(25 Kab/kota)	3.1.1.9	Jumlah kabupaten/kota yang terlibat administrasi dan terlibat teknis dalam melaksanakan lalu lintas hewan/ternak dan produk hewan antar provinsi	(25 Kab/kota)
2.2.1.10	Jumlah unit usaha pakan ternak yang diusulkan mendapatkan rekomendasi teknis pendafataran	1.4.1.1	Jumlah kelompok peternakan yang mampu mendorong produktivitas dan iklim usaha	(20 Kelompok)	2.1.1.1	Jumlah petaku usaha yang mampu mengakses fasilitas usaha	(750 Orang)	3.1.1.8	Jumlah kabupaten/kota yang terlibat administrasi dan terlibat teknis dalam melaksanakan lalu lintas hewan/ternak dan produk hewan antar provinsi	(25 Kab/kota)	3.1.1.9	Jumlah kabupaten/kota yang terlibat administrasi dan terlibat teknis dalam melaksanakan lalu lintas hewan/ternak dan produk hewan antar provinsi	(25 Kab/kota)	3.1.1.10	Jumlah kabupaten/kota yang terlibat administrasi dan terlibat teknis dalam melaksanakan lalu lintas hewan/ternak dan produk hewan antar provinsi	(25 Kab/kota)
2.2.1.11	Jumlah unit usaha pakan ternak yang diusulkan mendapatkan rekomendasi teknis pendafataran	1.4.1.1	Jumlah kelompok peternakan yang mampu mendorong produktivitas dan iklim usaha	(20 Kelompok)	2.1.1.1	Jumlah petaku usaha yang mampu mengakses fasilitas usaha	(750 Orang)	3.1.1.9	Jumlah kabupaten/kota yang terlibat administrasi dan terlibat teknis dalam melaksanakan lalu lintas hewan/ternak dan produk hewan antar provinsi	(25 Kab/kota)	3.1.1.10	Jumlah kabupaten/kota yang terlibat administrasi dan terlibat teknis dalam melaksanakan lalu lintas hewan/ternak dan produk hewan antar provinsi	(25 Kab/kota)	3.1.1.11	Jumlah kabupaten/kota yang terlibat administrasi dan terlibat teknis dalam melaksanakan lalu lintas hewan/ternak dan produk hewan antar provinsi	(25 Kab/kota)
2.2.1.12	Jumlah unit usaha pakan ternak yang diusulkan mendapatkan rekomendasi teknis pendafataran	1.4.1.1	Jumlah kelompok peternakan yang mampu mendorong produktivitas dan iklim usaha	(20 Kelompok)	2.1.1.1	Jumlah petaku usaha yang mampu mengakses fasilitas usaha	(750 Orang)	3.1.1.10	Jumlah kabupaten/kota yang terlibat administrasi dan terlibat teknis dalam melaksanakan lalu lintas hewan/ternak dan produk hewan antar provinsi	(25 Kab/kota)	3.1.1.11	Jumlah kabupaten/kota yang terlibat administrasi dan terlibat teknis dalam melaksanakan lalu lintas hewan/ternak dan produk hewan antar provinsi	(25 Kab/kota)	3.1.1.12	Jumlah kabupaten/kota yang terlibat administrasi dan terlibat teknis dalam melaksanakan lalu lintas hewan/ternak dan produk hewan antar provinsi	(25 Kab/kota)
2.2.1.13	Jumlah unit usaha pakan ternak yang diusulkan mendapatkan rekomendasi teknis pendafataran	1.4.1.1	Jumlah kelompok peternakan yang mampu mendorong produktivitas dan iklim usaha	(20 Kelompok)	2.1.1.1	Jumlah petaku usaha yang mampu mengakses fasilitas usaha	(750 Orang)	3.1.1.11	Jumlah kabupaten/kota yang terlibat administrasi dan terlibat teknis dalam melaksanakan lalu lintas hewan/ternak dan produk hewan antar provinsi	(25 Kab/kota)	3.1.1.12	Jumlah kabupaten/kota yang terlibat administrasi dan terlibat teknis dalam melaksanakan lalu lintas hewan/ternak dan produk hewan antar provinsi	(25 Kab/kota)	3.1.1.13	Jumlah kabupaten/kota yang terlibat administrasi dan terlibat teknis dalam melaksanakan lalu lintas hewan/ternak dan produk hewan antar provinsi	(25 Kab/kota)
2.2.1.14	Jumlah unit usaha pakan ternak yang diusulkan mendapatkan rekomendasi teknis pendafataran	1.4.1.1	Jumlah kelompok peternakan yang mampu mendorong produktivitas dan iklim usaha	(20 Kelompok)	2.1.1.1	Jumlah petaku usaha yang mampu mengakses fasilitas usaha	(750 Orang)	3.1.1.12	Jumlah kabupaten/kota yang terlibat administrasi dan terlibat teknis dalam melaksanakan lalu lintas hewan/ternak dan produk hewan antar provinsi	(25 Kab/kota)	3.1.1.13	Jumlah kabupaten/kota yang terlibat administrasi dan terlibat teknis dalam melaksanakan lalu lintas hewan/ternak dan produk hewan antar provinsi	(25 Kab/kota)	3.1.1.14	Jumlah kabupaten/kota yang terlibat administrasi dan terlibat teknis dalam melaksanakan lalu lintas hewan/ternak dan produk hewan antar provinsi	(25 Kab/kota)
2.2.1.15	Jumlah unit usaha pakan ternak yang diusulkan mendapatkan rekomendasi teknis pendafataran	1.4.1.1	Jumlah kelompok peternakan yang mampu mendorong produktivitas dan iklim usaha	(20 Kelompok)	2.1.1.1	Jumlah petaku usaha yang mampu mengakses fasilitas usaha	(750 Orang)	3.1.1.13	Jumlah kabupaten/kota yang terlibat administrasi dan terlibat teknis dalam melaksanakan lalu lintas hewan/ternak dan produk hewan antar provinsi	(25 Kab/kota)	3.1.1.14	Jumlah kabupaten/kota yang terlibat administrasi dan terlibat teknis dalam melaksanakan lalu lintas hewan/ternak dan produk hewan antar provinsi	(25 Kab/kota)	3.1.1.15	Jumlah kabupaten/kota yang terlibat administrasi dan terlibat teknis dalam melaksanakan lalu lintas hewan/ternak dan produk hewan antar provinsi	(25 Kab/kota)
2.2.1.16	Jumlah unit usaha pakan ternak yang diusulkan mendapatkan rekomendasi teknis pendafataran	1.4.1.1	Jumlah kelompok peternakan yang mampu mendorong produktivitas dan iklim usaha	(20 Kelompok)	2.1.1.1	Jumlah petaku usaha yang mampu mengakses fasilitas usaha	(750 Orang)	3.1.1.14	Jumlah kabupaten/kota yang terlibat administrasi dan terlibat teknis dalam melaksanakan lalu lintas hewan/ternak dan produk hewan antar provinsi	(25 Kab/kota)	3.1.1.15	Jumlah kabupaten/kota yang terlibat administrasi dan terlibat teknis dalam melaksanakan lalu lintas hewan/ternak dan produk hewan antar provinsi	(25 Kab/kota)	3.1.1.16	Jumlah kabupaten/kota yang terlibat administrasi dan terlibat teknis dalam melaksanakan lalu lintas hewan/ternak dan produk hewan antar provinsi	(25 Kab/kota)
2.2.1.17	Jumlah unit usaha pakan ternak yang diusulkan mendapatkan rekomendasi teknis pendafataran	1.4.1.1	Jumlah kelompok peternakan yang mampu mendorong produktivitas dan iklim usaha	(20 Kelompok)	2.1.1.1	Jumlah petaku usaha yang mampu mengakses fasilitas usaha	(750 Orang)	3.1.1.15	Jumlah kabupaten/kota yang terlibat administrasi dan terlibat teknis dalam melaksanakan lalu lintas hewan/ternak dan produk hewan antar provinsi	(25 Kab/kota)	3.1.1.16	Jumlah kabupaten/kota yang terlibat administrasi dan terlibat teknis dalam melaksanakan lalu lintas hewan/ternak dan produk hewan antar provinsi	(25 Kab/kota)	3.1.1.17	Jumlah kabupaten/kota yang terlibat administrasi dan terlibat teknis dalam melaksanakan lalu lintas hewan/ternak dan produk hewan antar provinsi	(25 Kab/kota)
2.2.1.18	Jumlah unit usaha pakan ternak yang diusulkan mendapatkan rekomendasi teknis pendafataran	1.4.1.1	Jumlah kelompok peternakan yang mampu mendorong produktivitas dan iklim usaha	(20 Kelompok)	2.1.1.1	Jumlah petaku usaha yang mampu mengakses fasilitas usaha	(750 Orang)	3.1.1.16	Jumlah kabupaten/kota yang terlibat administrasi dan terlibat teknis dalam melaksanakan lalu lintas hewan/ternak dan produk hewan antar provinsi	(25 Kab/kota)	3.1.1.17	Jumlah kabupaten/kota yang terlibat administrasi dan terlibat teknis dalam melaksanakan lalu lintas hewan/ternak dan produk hewan antar provinsi	(25 Kab/kota)	3.1.1.18	Jumlah kabupaten/kota yang terlibat administrasi dan terlibat teknis dalam melaksanakan lalu lintas hewan/ternak dan produk hewan antar provinsi	(25 Kab/kota)
2.2.1.19	Jumlah unit usaha pakan ternak yang diusulkan mendapatkan rekomendasi teknis pendafataran	1.4.1.1	Jumlah kelompok peternakan yang mampu mendorong produktivitas dan iklim usaha	(20 Kelompok)	2.1.1.1	Jumlah petaku usaha yang mampu mengakses fasilitas usaha	(750 Orang)	3.1.1.17	Jumlah kabupaten/kota yang terlibat administrasi dan terlibat teknis dalam melaksanakan lalu lintas hewan/ternak dan produk hewan antar provinsi	(25 Kab/kota)	3.1.1.18	Jumlah kabupaten/kota yang terlibat administrasi dan terlibat teknis dalam melaksanakan lalu lintas hewan/ternak dan produk hewan antar provinsi	(25 Kab/kota)	3.1.1.19	Jumlah kabupaten/kota yang terlibat administrasi dan terlibat teknis dalam melaksanakan lalu lintas hewan/ternak dan produk hewan antar provinsi	(25 Kab/kota)
2.2.1.20	Jumlah unit usaha pakan ternak yang diusulkan mendapatkan rekomendasi teknis pendafataran	1.4.1.1	Jumlah kelompok peternakan yang mampu mendorong produktivitas dan iklim usaha	(20 Kelompok)	2.1.1.1	Jumlah petaku usaha yang mampu mengakses fasilitas usaha	(750 Orang)	3.1.1.18	Jumlah kabupaten/kota yang terlibat administrasi dan terlibat teknis dalam melaksanakan lalu lintas hewan/ternak dan produk hewan antar provinsi	(25 Kab/kota)	3.1.1.19	Jumlah kabupaten/kota yang terlibat administrasi dan terlibat teknis dalam melaksanakan lalu lintas hewan/ternak dan produk hewan antar provinsi	(25 Kab/kota)	3.1.1.20	Jumlah kabupaten/kota yang terlibat administrasi dan terlibat teknis dalam melaksanakan lalu lintas hewan/ternak dan produk hewan antar provinsi	(25 Kab/kota)
2.2.1.21	Jumlah unit usaha pakan ternak yang diusulkan mendapatkan rekomendasi teknis pendafataran	1.4.1.1	Jumlah kelompok peternakan yang mampu mendorong produktivitas dan iklim usaha	(20 Kelompok)	2.1.1.1	Jumlah petaku usaha yang mampu mengakses fasilitas usaha	(750 Orang)	3.1.1.19	Jumlah kabupaten/kota yang terlibat administrasi dan terlibat teknis dalam melaksanakan lalu lintas hewan/ternak dan produk hewan antar provinsi	(25 Kab/kota)	3.1.1.20	Jumlah kabupaten/kota yang terlibat administrasi dan terlibat teknis dalam melaksanakan lalu lintas hewan/ternak dan produk hewan antar provinsi	(25 Kab/kota)	3.1.1.21	Jumlah kabupaten/kota yang terlibat administrasi dan terlibat teknis dalam melaksanakan lalu lintas hewan/ternak dan produk hewan antar provinsi	(25 Kab/kota)
2.2.1.22	Jumlah unit usaha pakan ternak yang diusulkan mendapatkan rekomendasi teknis pendafataran	1.4.1.1	Jumlah kelompok peternakan yang mampu mendorong produktivitas dan iklim usaha	(20 Kelompok)	2.1.1.1	Jumlah petaku usaha yang mampu mengakses fasilitas usaha	(750 Orang)	3.1.1.20	Jumlah kabupaten/kota yang terlibat administrasi dan terlibat teknis dalam melaksanakan lalu lintas hewan/ternak dan produk hewan antar provinsi	(25 Kab/kota)	3.1.1.21	Jumlah kabupaten/kota yang terlibat administrasi dan terlibat teknis dalam melaksanakan lalu lintas hewan/ternak dan produk hewan antar provinsi	(25 Kab/kota)	3.1.1.22	Jumlah kabupaten/kota yang terlibat administrasi dan terlibat teknis dalam melaksanakan lalu lintas hewan/ternak dan produk hewan antar provinsi	(25 Kab/kota)
2.2.1.23	Jumlah unit usaha pakan ternak yang diusulkan mendapatkan rekomendasi teknis pendafataran	1.4.1.1	Jumlah kelompok peternakan yang mampu mendorong produktivitas dan iklim usaha	(20 Kelompok)	2.1.1.1	Jumlah petaku usaha yang mampu mengakses fasilitas usaha	(750 Orang)	3.1.1.21	Jumlah kabupaten/kota yang terlibat administrasi dan terlibat teknis dalam melaksanakan lalu lintas hewan/ternak dan produk hewan antar provinsi	(25 Kab/kota)	3.1.1.22	Jumlah kabupaten/kota yang terlibat administrasi dan terlibat teknis dalam melaksanakan lalu lintas hewan/ternak dan produk hewan antar provinsi	(25 Kab/kota)	3.1.1.23	Jumlah kabupaten/kota yang terlibat administrasi dan terlibat teknis dalam melaksanakan lalu lintas hewan/ternak dan produk hewan antar provinsi	(25 Kab/kota)
2.2.1.24	Jumlah unit usaha pakan ternak yang diusulkan mendapatkan rekomendasi teknis pendafataran	1.4.1.1	Jumlah kelompok peternakan yang mampu mendorong produktivitas dan iklim usaha	(20 Kelompok)	2.1.1.1	Jumlah petaku usaha yang mampu mengakses fasilitas usaha	(750 Orang)	3.1.1.22	Jumlah kabupaten/kota yang terlibat administrasi dan terlibat teknis dalam melaksanakan lalu lintas hewan/ternak dan produk hewan antar provinsi	(25 Kab/kota)	3.1.1.23	Jumlah kabupaten/kota yang terlibat administrasi dan terlibat teknis dalam melaksanakan lalu lintas hewan/ternak dan produk hewan antar provinsi	(25 Kab/kota)	3.1.1.24	Jumlah kabupaten/kota yang terlibat administrasi dan terlibat teknis dalam melaksanakan lalu lintas hewan/ternak dan produk hewan antar provinsi	(25 Kab/kota)
2.2.1.25	Jumlah unit usaha pakan ternak yang diusulkan mendapatkan rekomendasi teknis pendafataran	1.4.1.1	Jumlah kelompok peternakan yang mampu mendorong produktivitas dan iklim usaha	(20 Kelompok)	2.1.1.1	Jumlah petaku usaha yang mampu mengakses fasilitas usaha	(750 Orang)	3.1.1.23	Jumlah kabupaten/kota yang terlibat administrasi dan terlibat teknis dalam melaksanakan lalu lintas hewan/ternak dan produk hewan antar provinsi	(25 Kab/kota)	3.1.1.24	Jumlah kabupaten/kota yang terlibat administrasi dan terlibat teknis dalam melaksanakan lalu lintas hewan/ternak dan produk hewan antar provinsi	(25 Kab/kota)	3.1.1.25	Jumlah kabupaten/kota yang terlibat administrasi dan terlibat teknis dalam melaksanakan lalu lintas hewan/ternak dan produk hewan antar provinsi	(25 Kab/kota)
2.2.1.26	Jumlah unit usaha pakan ternak yang diusulkan mendapatkan rekomendasi teknis pendafataran	1.4.1.1	Jumlah kelompok peternakan yang mampu mendorong produktivitas dan iklim usaha	(20 Kelompok)	2.1.1.1	Jumlah petaku usaha yang mampu mengakses fasilitas usaha	(750 Orang)	3.1.1.24	Jumlah kabupaten/kota yang terlibat administrasi dan terlibat teknis dalam melaksanakan lalu lintas hewan/ternak dan produk hewan antar provinsi	(25 Kab/kota)	3.1.1.25	Jumlah kabupaten/kota yang terlibat administrasi dan terlibat teknis dalam melaksanakan lalu lintas hewan/ternak dan produk hewan antar provinsi	(25 Kab/kota)	3.1.1.26	Jumlah kabupaten/kota yang terlibat administrasi dan terlibat teknis dalam melaksanakan lalu lintas hewan/ternak dan produk hewan antar provinsi	(25 Kab/kota)
2.2.1.27	Jumlah unit usaha pakan ternak yang diusulkan mendapatkan rekomendasi teknis pendafataran	1.4.1.1	Jumlah kelompok peternakan yang mampu mendorong produktivitas dan iklim usaha	(20 Kelompok)	2.1.1.1	Jumlah petaku usaha yang mampu mengakses fasilitas usaha	(750 Orang)	3.1.1.25	Jumlah kabupaten/kota yang terlibat administrasi dan terlibat teknis dalam melaksanakan lalu lintas hewan/ternak dan produk hewan antar provinsi	(25 Kab/kota)	3.1.1.26	Jumlah kabupaten/kota yang terlibat administrasi dan terlibat teknis dalam melaksanakan lalu lintas hewan/ternak dan produk hewan antar provinsi	(25 Kab/kota)	3.1.1.27	Jumlah kabupaten/kota yang terlibat administrasi dan terlibat teknis dalam melaksanakan lalu lintas hewan/ternak dan produk hewan antar provinsi	(25 Kab/kota)
2.2.1.28	Jumlah unit usaha pakan ternak yang diusulkan mendapatkan rekomendasi teknis pendafataran	1.4.1.1	Jumlah kelompok peternakan yang mampu mendorong produktivitas dan iklim usaha	(20 Kelompok)	2.1.1.1	Jumlah petaku usaha yang mampu mengakses fasilitas usaha	(750 Orang)	3.1.1.26	Jumlah kabupaten/kota yang terlibat administrasi dan terlibat teknis dalam melaksanakan lalu lintas hewan/ternak dan produk hewan antar provinsi	(25 Kab/kota)	3.1.1.27	Jumlah kabupaten/kota yang terlibat administrasi dan terlibat teknis dalam melaksanakan lalu lintas hewan/ternak dan produk hewan antar provinsi	(25 Kab/kota)	3.1.1.28	Jumlah kabupaten/kota yang terlibat administrasi dan terlibat teknis dalam melaksanakan lalu lintas hewan/ternak dan produk hewan antar provinsi	(25 Kab/kota)
2.2.1.29	Jumlah unit usaha pakan ternak yang diusulkan mendapatkan rekomendasi teknis pendafataran	1.4.1.1	Jumlah kelompok peternakan yang mampu mendorong produktivitas dan iklim usaha	(20 Kelompok)	2.1.1.1	Jumlah petaku usaha yang mampu mengakses fasilitas usaha	(750 Orang)	3.1.1.27	Jumlah kabupaten/kota yang terlibat administrasi dan terlibat teknis dalam melaksanakan lalu lintas hewan/ternak dan produk hewan antar provinsi	(25 Kab/kota)	3.1.1.28	Jumlah kabupaten/kota yang terlibat administrasi dan terlibat teknis dalam melaksanakan lalu lintas hewan/ternak dan produk hewan antar provinsi	(25 Kab/kota)	3.1.1.29	Jumlah kabupaten/kota yang terlibat administrasi dan terlibat teknis dalam melaksanakan lalu lintas hewan/ternak dan produk hewan antar provinsi	(25 Kab/kota)
2.2.1.30	Jumlah unit usaha pakan ternak yang diusulkan mendapatkan rekomendasi teknis pendafataran	1.4.1.1	Jumlah kelompok peternakan yang mampu mendorong produktivitas dan iklim usaha	(20 Kelompok)	2.1.1.1	Jumlah petaku usaha yang mampu mengakses fasilitas usaha	(750 Orang)	3.1.1.28	Jumlah kabupaten/kota yang terlibat administrasi dan terlibat teknis dalam melaksanakan lalu lintas hewan/ternak dan produk hewan antar provinsi	(25 Kab/kota)	3.1.1.29	Jumlah kabupaten/kota yang terlibat administrasi dan terlibat teknis dalam melaksanakan lalu lintas hewan/ternak dan produk hewan antar provinsi	(25 Kab/kota)	3.1.1.30	Jumlah kabupaten/kota yang terlibat administrasi dan terlibat teknis dalam melaksanakan lalu lintas hewan/ternak dan produk hewan antar provinsi	(25 Kab/kota)
2.2.1.31	Jumlah unit usaha pakan ternak yang diusulkan mendapatkan rekomendasi teknis pendafataran	1.4.1.1	Jumlah kelompok peternakan yang mampu mendorong produktivitas dan iklim usaha	(20 Kelompok)	2.1.1.1	Jumlah petaku usaha yang mampu mengakses fasilitas usaha	(750 Orang)	3.1.1.29	Jumlah kabupaten/kota yang terlibat administrasi dan terlibat teknis dalam melaksanakan lalu lintas hewan/ternak dan produk hewan antar provinsi	(25 Kab/kota)	3.1.1.30	Jumlah kabupaten/kota yang terlibat administrasi dan terlibat teknis dalam melaksanakan lalu lintas hewan/ternak dan produk hewan antar provinsi	(25 Kab/kota)	3.1.1.31	Jumlah kabupaten/kota yang terlibat administrasi dan terlibat teknis dalam melaksanakan lalu lintas hewan/ternak dan produk hewan antar provinsi	(25 Kab/kota)
2.2.1.32	Jumlah unit usaha pakan ternak yang diusulkan mendapatkan rekomendasi teknis pendafataran	1.4.1.1	Jumlah kelompok peternakan yang mampu mendorong produktivitas dan iklim usaha	(20 Kelompok)	2.1.1.1	Jumlah petaku usaha yang mampu mengakses fasilitas usaha	(750 Orang)	3.1.1.30	Jumlah kabupaten/kota yang terlibat administrasi dan terlibat teknis dalam melaksanakan lalu lintas hewan/ternak dan produk hewan antar provinsi	(25 Kab/kota)	3.1.1.31	Jumlah kabupaten/kota yang terlibat administrasi dan terlibat teknis dalam melaksanakan lalu lintas hewan/ternak dan produk hewan antar provinsi	(25 Kab/kota)	3.1.1.32	Jumlah kabupaten/kota yang terlibat administrasi dan terlibat teknis dalam melaksanakan lalu lintas hewan/ternak dan produk hewan antar provinsi	(25 Kab/kota)
2.2.1.33	Jumlah unit usaha pakan ternak yang diusulkan mendapatkan rekomendasi teknis pendafataran	1.4.1.1	Jumlah kelompok peternakan yang mampu mendorong produktivitas dan iklim usaha	(20 Kelompok)	2.1.1.1	Jumlah petaku usaha yang mampu mengakses fasilitas usaha	(750 Orang)	3.1.1.31	Jumlah kabupaten/kota yang terlibat administrasi dan terlibat teknis dalam melaksanakan lalu lintas hewan/ternak dan produk hewan antar provinsi	(25 Kab/kota)	3.1.1.32	Jumlah kabupaten/kota yang terlibat administrasi dan terlibat teknis dalam melaksanakan lalu lintas hewan/ternak dan produk hewan antar provinsi	(25 Kab/kota)	3.1.1.33	Jumlah kabupaten/kota yang terlibat administrasi dan terlibat teknis dalam melaksanakan lalu lintas hewan/ternak dan produk hewan antar provinsi	(25 Kab/kota)
2.2.1.34	Jumlah unit usaha pakan ternak yang diusulkan mendapatkan rekomendasi teknis pendafataran	1.4.1.1	Jumlah kelompok peternakan yang mampu mendorong produktivitas dan iklim usaha	(20 Kelompok)	2.1.1.1	Jumlah petaku usaha yang mampu mengakses fasilitas usaha	(750 Orang)	3.1.1.32	Jumlah kabupaten/kota yang terlibat administrasi dan terlibat teknis dalam melaksanakan lalu lintas hewan/ternak dan produk hewan antar provinsi	(25 Kab/kota)	3.1.1.33	Jumlah kabupaten/kota yang terlibat administrasi dan terlibat teknis dalam melaksanakan lalu lintas hewan/ternak dan produk hewan antar provinsi	(25 Kab/kota)	3.1.1.34	Jumlah kabupaten/kota yang terlibat administrasi dan terlibat teknis dalam melaksanakan lalu lintas hewan/ternak dan produk hewan antar provinsi	(25 Kab/kota)
2.2.1.35	Jumlah unit usaha pakan ternak yang diusulkan mendapatkan rekomendasi teknis pendafataran	1.4.1.1	Jumlah kelompok peternakan yang mampu mendorong produktivitas dan iklim usaha	(20 Kelompok)	2.1.1.1	Jumlah petaku usaha yang mampu mengakses fasilitas usaha	(750 Orang)	3.1.1.33	Jumlah kabupaten/kota yang terlibat administrasi dan terlibat teknis dalam melaksanakan lalu lintas hewan/ternak dan produk hewan antar provinsi	(25 Kab/kota)	3.1.1.34	Jumlah kabupaten/kota yang terlibat administrasi dan terlibat teknis dalam melaksanakan lalu lintas hewan/ternak dan produk hewan antar provinsi	(25 Kab/kota)	3.1.1.35	Jumlah kabupaten/kota yang terlibat administrasi dan terlibat teknis dalam melaksanakan lalu lintas hewan/ternak dan produk hewan antar provinsi	(25 Kab/kota)
2.2.1.36	Jumlah unit usaha pakan ternak yang diusulkan mendapatkan rekomendasi teknis pendafataran	1.4.1.1	Jumlah kelompok peternakan yang mampu mendorong produktivitas dan iklim usaha	(20 Kelompok)	2.1.1.1	Jumlah petaku usaha yang mampu mengakses fasilitas usaha	(750 Orang)	3.1.1.34	Jumlah kabupaten/kota yang terlibat administrasi dan terlibat teknis dalam melaksanakan lalu lintas hewan/ternak dan produk hewan antar provinsi	(25 Kab/kota)	3.1.1.35	Jumlah kabupaten/kota yang terlibat administrasi dan terlibat teknis dalam melaksanakan lalu lintas hewan/ternak dan produk hewan antar provinsi	(25 Kab/kota)	3.1.1.36	Jumlah kabupaten/kota yang terlibat administrasi dan terlibat teknis dalam melaksanakan lalu lintas hewan/ternak dan produk hewan antar provinsi	(25 Kab/kota)
2.2.1.37	Jumlah unit usaha pakan ternak yang diusulkan mendapatkan rekomendasi teknis pendafataran	1.4.1.1	Jumlah kelompok peternakan yang mampu mendorong produktivitas dan iklim usaha	(20 Kelompok)	2.1.1.1	Jumlah petaku usaha yang mampu mengakses fasilitas usaha	(750 Orang)	3.1.1.35	Jumlah kabupaten/kota yang terlibat administrasi dan terlibat teknis dalam melaksanakan lalu lintas hewan/ternak dan produk hewan antar provinsi	(25 Kab/kota)	3.1.1.36	Jumlah kabupaten/kota yang terlibat administrasi dan terlibat teknis dalam melaksanakan lalu lintas hewan/ternak dan produk hewan antar provinsi	(25 Kab/kota)	3.1.1.37	Jumlah kabupaten/kota yang terlibat administrasi dan terlibat teknis dalam melaksanakan lalu lintas hewan/ternak dan produk hewan antar provinsi	(25 Kab/kota)
2.2.1.38	Jumlah unit usaha pakan ternak yang diusulkan mendapatkan rekomendasi teknis pendafataran	1.4.1.1	Jumlah kelompok peternakan yang mampu mendorong produktivitas dan iklim usaha	(20 Kelompok)	2.1.1.1	Jumlah petaku usaha yang mampu mengakses fasilitas usaha	(750 Orang)	3.1.1.36	Jumlah kabupaten/kota yang terlibat administrasi dan terlibat teknis dalam melaksanakan lalu lintas hewan/ternak dan produk hewan antar provinsi	(25 Kab/kota)	3.1.1.37	Jumlah kabupaten/kota yang terlibat administrasi dan terlibat teknis dalam melaksanakan lalu lintas hewan/ternak dan produk hewan antar provinsi	(25 Kab/kota)	3.1.1.38	Jumlah kabupaten/kota yang terlibat administrasi dan terlibat teknis dalam melaksanakan lalu lintas hewan/ternak dan produk hewan antar provinsi	(25 Kab/kota)
2.2.1.39	Jumlah unit usaha pakan ternak yang diusulkan mendapatkan rekomendasi teknis pendafataran	1.4.1.1	Jumlah kelompok peternakan yang mampu mendorong produktivitas dan iklim usaha	(20 Kelompok)	2.1.1.1	Jumlah petaku usaha yang mampu mengakses fasilitas usaha	(750 Orang)	3.1.1.37	Jumlah kabupaten/kota yang terlibat administrasi dan terlibat teknis dalam melaksanakan lalu lintas hewan/ternak dan produk hewan antar provinsi	(25 Kab/kota)	3.1.1.38	Jumlah kabupaten/kota yang terlibat administrasi dan terlibat teknis dalam melaksanakan lalu lintas hewan/ternak dan produk hewan antar provinsi	(25 Kab/kota)	3.1.1.39	Jumlah kabupaten/kota yang terlibat administrasi dan terlibat teknis dalam melaksanakan lalu lintas hewan/ternak dan produk hewan antar provinsi	(25 Kab/kota)
2.2.1.40	Jumlah unit usaha pakan ternak yang diusulkan mendapatkan rekomendasi teknis pendafataran	1.4.1.1	Jumlah kelompok peternakan yang mampu mendorong produktivitas dan iklim usaha	(20 Kelompok)	2.1.1.1	Jumlah petaku usaha yang mampu mengakses fasilitas usaha	(750 Orang)	3.1.1.38	Jumlah kabupaten/kota yang terlibat administrasi dan terlibat teknis dalam melaksanakan lalu lintas hewan/ternak dan produk hewan antar provinsi	(25 Kab/kota)	3.1.1.39	Jumlah kabupaten/kota yang terlibat administrasi dan terlibat teknis dalam melaksanakan lalu lintas hewan/ternak dan produk hewan antar provinsi	(25 Kab/kota)	3.1.1.40	Jumlah kabupaten/kota yang terlibat administrasi dan terlibat teknis dalam melaksanakan lalu lintas hewan/ternak dan produk hewan antar provinsi	(25 Kab/kota)
2.2.1.41	Jumlah unit usaha pakan ternak yang diusulkan mendapatkan rekomendasi teknis pendafataran	1.4.1.1	Jumlah kelompok peternakan yang mampu mendorong produktivitas dan iklim usaha	(20 Kelompok)	2.1.1.1	Jumlah petaku usaha yang mampu mengakses fasilitas usaha	(750 Orang)	3.1.1.39	Jumlah kabupaten/kota yang terlibat administrasi dan terlibat teknis dalam melaksanakan lalu lintas hewan/ternak dan produk hewan antar provinsi	(25 Kab/kota)	3.1.1.40	Jumlah kabupaten/kota yang terlibat administrasi dan terlibat teknis dalam melaksanakan lalu lintas hewan/ternak dan produk hewan antar provinsi	(25 Kab/kota)	3.1.1.41	Jumlah kabupaten/kota yang terlibat administrasi dan terlibat teknis dalam melaksanakan lalu lintas hewan/ternak dan produk hewan antar provinsi	(25 Kab/kota)
2.2.1.42	Jumlah unit usaha pakan ternak yang diusulkan mendapatkan rekomendasi teknis pendafataran	1.4.1.1	Jumlah kelompok peternakan yang mampu mendorong produktivitas dan													



<p><b>Pengawas Kualitas Produk Hasil Peternakan</b></p> <p>Tersedianya Data Kelompok yang Menerapkan Good Breeding Practice</p> <p>1.1.1.1.1. Jumlah fasilitas terhadap Kelompok Pembibit yang sudah menerapkan sistem Good Breeding Practice (GBR), berupa sekolah lapang serta dukungan peralatan untuk tingkat umur, Tersedianya Kelompok yang menerapkan Reproduksi Mutu bibit, penggua bibit unggul, penjarangan bibit hasil inseminasi buatan (IB) dan Embrio Transfer (ET)</p> <p>1.1.2.1.1. Jumlah Kelompok dan perusahaan yang telah melakukan Standar bibit dan pemanfaatan Bibit berkualitas hasil Penjarangan Bibit</p> <p>Tersedianya Data Wilayah Konservasi Sumber Daya Genetik Sapi Pasundan, ayam Pelung, Domba garut di Kabupaten/Kota</p> <p>1.1.2.1.1. Jumlah kabupaten yang terdapat sebagai Wilayah Konservasi SDG Sapi Pasundan, Domba Garut dan Ayam Pelung</p> <p><b>Pengawas Kualitas Produk Hasil Peternakan</b></p> <p>Tersedianya data Kelompok yang menerapkan Good Breeding Practice</p> <p>1.1.1.2.1.1. Jumlah breeder yang di pantau Tersedianya rekomendasi teknis</p> <p>1.1.2.1.1.1. Jumlah rekomendasi teknis standarisasi mutu bibit, penggunaan bibit unggul, penjarangan bibit hasil inseminasi buatan (IB), embrio transfer</p> <p>Tersedianya Data Kab./Kota sebagai plasma nutfah dan asasan distribusi semen ke kab./kota</p> <p>1.1.2.1.1.1. Jumlah domba distribusi semen kebu sapi potong ke kab.kota</p> <p>1.1.2.1.1.2. Jumlah kabupaten/kota pengembangan plasma nutfah yang di pantau dan terdapat</p>	<p><b>Pengadministrasi Teknis dan Umum</b></p> <p>Tersedianya data distribusi Nitrogen Cair (NPKU) Kabupaten yang Menerapkan CPM 1.2.2.1.2.1. Jumlah data hasil pengawasan Pembuatan Pakan yang Baik (CPBB) yang dikumpulkan</p> <p>1.1.2.3.1.1. Jumlah data Prosentase kelahiran Sapi (Angka Kebuntingan IB, Jarak Kelahiran, Prosentase Kebuntingan)</p> <p>1.1.2.3.1.2. Jumlah data prosentase anak domba, kambing yang lahir hidup/lanir crop</p> <p>1.1.2.3.2.2. Pencetakan kartu Surat Jinj Meksakanan Inseminasi/ SMI</p> <p>Terlaksananya administrasi Barang di Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat</p> <p>0.0.0.0.0. Jumlah administrasi barang bidang produksi yang dilaksanakan</p> <p><b>Pengadministrasi Keuangan</b></p> <p>Tersedianya dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu</p> <p>0.0.0.0.0. Jumlah penelitian terhadap kelengkapan pencairan sebagai bahan penerbitan SP2D</p> <p>0.0.0.0.0. Jumlah Pengajuan pencairan anggaran kegiatan yang diajukan sesuai dengan Anggaran Kas</p> <p><b>Pengadministrasi Teknis dan Umum</b></p> <p>Tersedianya data administrasi keuangan</p> <p>0.0.0.0.0. Jumlah laporan SP2D BPP yang dikoreksi</p> <p>Tersedianya dokumen pelaporan yang disusun tepat waktu</p> <p>0.0.0.0.0. Jumlah laporan/Surat Pertanggungjawaban (SPJ) pengeluaran yang dilaporkan secara administratif kepada penguasa anggaran</p> <p>0.0.0.0.0. Jumlah laporan realisasi anggaran belanja SKPD</p>	<p><b>Pulahta Pakan Ternak</b></p> <p>Tersedianya data Hasil Pengawasan Pakan/Kabupaten yang Menerapkan CPM 1.2.2.1.2.1. Jumlah data hasil pengawasan Pembuatan Pakan yang Baik (CPBB) yang dikumpulkan</p> <p>Tersedianya dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu</p> <p>0.0.0.0.0. Jumlah Surat Permintaan Pembayaran yang diajukan</p> <p>0.0.0.0.0. Jumlah laporan SP2D BPP yang dikoreksi</p> <p>0.0.0.0.0. Jumlah pengajuan/penerbitan SPJ yang diinput kedalam buku-buku register</p> <p>0.0.0.0.0. Jumlah SPI yang diteliti</p> <p>Jumlah penatausahaan pembayaran/pengeluaran yang dilaksanakan</p> <p><b>Pengadministrasi Teknis dan Keuangan</b></p> <p>Tersedianya data Hasil Penerimaan Mutu Pakan di Jawa Barat</p> <p>1.2.2.1.3.1. Jumlah Kegiatan Verifikasi Surat Pembinaan Teknis Penerimaan Mutu Pakan</p> <p>1.2.2.1.3.2. Jumlah Kegiatan Pengambilan Sampel Pakan di Kab/Kota</p> <p>Terealisasinya data administrasi perencanaan sesuai kebutuhan</p> <p>0.0.0.0.0. Jumlah Surat Permintaan Pembayaran yang diajukan</p> <p>0.0.0.0.0. Jumlah pengajuan/penerbitan SPJ yang diinput kedalam buku-buku register</p> <p>Terealisasinya data administrasi keuangan sesuai kebutuhan</p> <p>0.0.0.0.0. Jumlah SPI yang diteliti</p> <p>Jumlah penatausahaan pembayaran/pengeluaran yang dilaksanakan</p>	<p><b>Pulahta Penataan Kawasan</b></p> <p>Tersedianya data pengembangan dan penataan kawasan peternakan</p> <p>2.2.1.1.1.1. Jumlah data kesesuaian agro ekosistem sebagai bahan penyusunan perencanaan, penataan peta potensi pengembangan kawasan serta penginventarian lokasi peternakan</p> <p>2.2.1.1.1.2. Jumlah inventarisasi koordinat lokasi peternakan dan pengembangan kawasan usaha peternakan</p> <p>2.2.1.1.1.3. Jumlah monitoring program dan kegiatan penataan kawasan peternakan</p> <p>2.2.1.1.1.4. Jumlah koordinasi dan konsultasi dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah dan instansi/Unit kerja terkait</p> <p>2.2.1.2.1.2. Jumlah rencana aksi kabupaten dalam pengembangan dan penataan kawasan peternakan</p> <p>2.2.1.2.1.3. Jumlah rekapitulasi data pendukung kawasan peternakan di Jawa Barat</p>	<p><b>Pengadministrasi Keuangan</b></p> <p>Tersedianya dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu</p> <p>0.0.0.0.0. Jumlah penelitian terhadap kelengkapan pencairan sebagai bahan penerbitan SP2D</p> <p>0.0.0.0.0. Jumlah Pengajuan pencairan anggaran kegiatan yang diajukan sesuai dengan Anggaran Kas</p> <p><b>Pengadministrasi Teknis dan Umum</b></p> <p>Tersedianya data administrasi keuangan</p> <p>0.0.0.0.0. Jumlah laporan SP2D BPP yang dikoreksi</p> <p>Tersedianya dokumen pelaporan yang disusun tepat waktu</p> <p>0.0.0.0.0. Jumlah laporan/Surat Pertanggungjawaban (SPJ) pengeluaran yang dilaporkan secara administratif kepada penguasa anggaran</p> <p>0.0.0.0.0. Jumlah laporan realisasi anggaran belanja SKPD</p>	<p><b>Pulahta Datin</b></p> <p>Tersedianya data sasaran target produksi daging, telur, susu</p> <p>1.1.1.1.1.1. Jumlah data sasaran target daging, telur, susu yang direkap dari kabupaten/kota</p> <p>Tersedianya data rekapitulasi populasi ternak</p> <p>1.1.2.1.1.1. Jumlah data, rekapitulasi, dan pengolahan data sasaran target populasi ternak</p> <p>Tersedianya data informasi untuk dipublikasikan</p> <p>0.0.0.0.0. Jumlah data dan informasi yang dipublikasikan melalui media cetak</p> <p><b>Pengadministrasi Keuangan</b></p> <p>Tersedianya dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu</p> <p>0.0.0.0.0. Jumlah laporan SP2D BPP yang dikoreksi</p> <p>0.0.0.0.0. Jumlah pengajuan/penerbitan SPJ yang diinput kedalam buku-buku register</p> <p>0.0.0.0.0. Jumlah SPI yang diteliti</p> <p>Jumlah penatausahaan pembayaran/pengeluaran yang dilaksanakan</p>	<p><b>Petugas Pengembangan Layanan Informasi Pasar</b></p> <p>Tersedianya data pelaku usaha dan informasi hasil peternakan</p> <p>1.3.1.1.1.1. Jumlah promo yang diikuti pelaku usaha pemasaran</p> <p>1.3.1.1.1.2. Jumlah Data Informasi Pasar dari Petugas Pelayanan Informasi Pasar</p> <p>1.3.1.1.1.3. Jumlah hasil temu usaha</p> <p><b>Pengadministrasi Keuangan</b></p> <p>Tersedianya dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu</p> <p>0.0.0.0.0. Jumlah penelitian terhadap kelengkapan pencairan sebagai bahan penerbitan SP2D</p> <p>0.0.0.0.0. Jumlah Pengajuan pencairan anggaran kegiatan yang diajukan sesuai dengan Anggaran Kas</p> <p><b>Pengadministrasi Teknis dan Umum</b></p> <p>Tersedianya data administrasi keuangan</p> <p>0.0.0.0.0. Jumlah laporan SP2D BPP yang dikoreksi</p> <p>Tersedianya dokumen pelaporan yang disusun tepat waktu</p> <p>0.0.0.0.0. Jumlah laporan/Surat Pertanggungjawaban (SPJ) pengeluaran yang dilaporkan secara administratif kepada penguasa anggaran</p> <p>0.0.0.0.0. Jumlah laporan realisasi anggaran belanja SKPD</p>	<p><b>Pengadministrasi Teknis dan Umum</b></p> <p>Tersedianya data pelaku usaha pengolahan hasil peternakan</p> <p>1.2.2.1.1.1. Jumlah pelaku usaha yang melakukan pengolahan hasil peternakan yang terdapat</p> <p>1.4.1.1.2.1. Jumlah surat masuk dan surat keluar yang dicatat ke dalam buku agenda</p> <p>Tersedianya dokumen keuangan yang akurat dan tepat waktu</p> <p>0.0.0.0.0. Prosentase pengajuan SPM dan ADK kontrak ke SPN</p> <p><b>Pengelola Data</b></p> <p>Tersedianya Data Pelaku Usaha Pengolahan Hasil Peternakan</p> <p>1.2.2.1.1.1. Pengumpulan data pelaku usaha pengolahan hasil peternakan</p> <p>Tersedianya Data Pelaku Usaha Pengolahan yang mengukung / memproses / menerapkan sistem jaminan mutu/GMP</p> <p>1.2.2.1.2.1. Identifikasi dan seleksi pelaku usaha pengolahan hasil peternakan yang menerapkan teknologi pengolahan</p> <p>Tersedianya Data Pelaku Usaha Pengolahan yang menerapkan teknologi pengolahan</p> <p>1.2.2.1.2.1.1. Jumlah pelaku usaha pengolahan hasil peternakan yang menerapkan teknologi pengolahan</p> <p>1.2.2.1.2.2. Jumlah pelaku usaha yang melakukan inovasi pengolahan hasil peternakan</p>	<p><b>Pengadministrasi Teknis dan Umum</b></p> <p>Tersedianya data kelompok ternak di Jawa Barat</p> <p>1.4.1.1.1.1. Jumlah Kelompok Tani Ternak yang memperoleh sosialisasi dan pembinaan dalam pelaksanaan kelompok tani berprestasi tingkat Jawa Barat dan Nasional</p> <p>Tersedianya data stakeholder yang menyepakati manajemen kelembagaan tani ternak</p> <p>1.4.1.1.2.1. Jumlah Inisiatif, Dokumen Manajemen Kelembagaan Tani Ternak</p> <p>Meningkatnya Usaha Peternakan yang Ekonomis</p> <p>2.1.1.2.1.2. 2.1.1.4 Jumlah dokumen kajian Kelembagaan</p> <p><b>Pengadministrasi Teknis dan Umum</b></p> <p>Tersedianya data kelompok ternak di Jawa Barat</p> <p>1.4.1.1.1.1. Jumlah Kelompok Tani Ternak yang memperoleh sosialisasi dan pembinaan dalam pelaksanaan kelompok tani berprestasi tingkat Jawa Barat dan Nasional</p> <p>Tersedianya data stakeholder yang menyepakati manajemen kelembagaan tani ternak</p> <p>1.4.1.1.2.1. Jumlah Inisiatif, Dokumen Manajemen Kelembagaan Tani Ternak</p> <p>Meningkatnya Usaha Peternakan yang Ekonomis</p> <p>2.1.1.2.1.2. 2.1.1.4 Jumlah dokumen kajian Kelembagaan</p>	<p><b>Pulahta P3H</b></p> <p>Tersedianya data P3H</p> <p>1.1.2.1.1.1.1. Jumlah Data Pelaporan Pencegahan Cacangan pada Ternak</p> <p>1.1.2.1.1.1.1. Jumlah Pelayanan Pencegahan Gangguan Reproduksi pada Ternak Ruminansia</p> <p>1.1.2.1.1.1.1. data hasil pemeriksaan kesehatan hewan sebagai bahan penerbitan surat keterangan kesehatan hewan tujuan antar provinsi dan ekspor</p> <p>1.1.2.1.1.1.1. Jumlah Kabupaten/Kota yang terdapat dalam Pengendalian PHMS dan Zoonosa</p> <p>1.1.2.1.1.1.1. Jumlah data Vaksinasi PHMS</p> <p>1.1.2.1.1.1.1. Jumlah data Kabupaten/Kota dalam Rangka Pengawasan Lalulintas Hewan/Ternak antar Provinsi</p>	<p><b>Pulahta P3OH</b></p> <p>Tersedianya data Bahan Pengamatan Penyakit Hewan</p> <p>1.2.2.1.1.1. Jumlah rekapan pengawisan obat hewan</p> <p>1.2.2.1.1.1.1. Jumlah data Perlinan perusahaan Obat Hewan</p> <p>1.2.2.1.1.1.1. Jumlah rekap Sertifikat Pullorum dan Kompetensi yang diolah dan diajukan</p> <p>Tersedianya data pengawasan obat hewan</p> <p>3.1.1.1.1.1.1. Jumlah data Laporan Penggigitan HHR dari 27 kab./kota</p> <p><b>Pengadministrasi Keuangan</b></p> <p>Tersedianya dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu</p> <p>0.0.0.0.0. Jumlah penelitian terhadap kelengkapan pencairan sebagai bahan penerbitan SP2D</p> <p>0.0.0.0.0. Jumlah Pengajuan pencairan anggaran kegiatan yang diajukan sesuai dengan Anggaran Kas</p> <p>Tersedianya dokumen administrasi keuangan</p> <p>0.0.0.0.0. Jumlah laporan SP2D BPP yang dikoreksi</p> <p>Tersedianya dokumen pelaporan yang disusun tepat waktu</p> <p>0.0.0.0.0. Jumlah laporan/Surat Pertanggungjawaban (SPJ) pengeluaran yang dilaporkan secara administratif kepada penguasa anggaran</p> <p>0.0.0.0.0. Jumlah laporan realisasi anggaran belanja SKPD</p>	<p><b>Pengadministrasi Teknis dan Umum</b></p> <p>Meningkatnya kualitas dan keamanan produk</p> <p>1.2.1.1.1.1. Jumlah Laporan kegiatan seksi Kesmat</p> <p>1.2.2.4.1.1. Jumlah data bahan audit dan surveilans MCV</p> <p>1.2.2.4.1.2. Jumlah Laporan kegiatan seksi Kesmat</p> <p>1.1.2.2.1.1. Jumlah Laporan Pencegahan Gangguan Reproduksi pada Ternak Ruminansia</p> <p>1.1.2.2.1.1.1. data hasil pemeriksaan kesehatan hewan sebagai bahan penerbitan surat keterangan kesehatan hewan tujuan antar provinsi dan ekspor</p> <p>Terkindalnya penyakit hewan menular</p> <p>3.1.1.4.1.1.1. Jumlah bahan pertimbangan teknis pengajuan rekomendasi lalulintas produk hewan</p>	<p><b>Penyusun Rencana Program dan Kegiatan</b></p> <p>Tersedianya dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu</p> <p>0.0.0.0.0. Jumlah dokumen DPA dan DPA untuk dinas peternakan provinsi dan kabupaten/kota</p> <p>0.0.0.0.0. Jumlah entry data RKPD Online yang diinput ke Unit Kerja yang dilaksanakan</p> <p><b>Pulahta Program dan Kegiatan</b></p> <p>Tersedianya dokumen pelaporan yang disusun tepat waktu</p> <p>0.0.0.0.0. Jumlah penyusunan, distribusi dan komposisi Laporan Kegiatan Bulanan, Semester dan Tahunan</p> <p>0.0.0.0.0. Melaksanakan penyusunan laporan, monitoring dan evaluasi kegiatan Sub Bagian</p> <p>0.0.0.0.0. Melaksanakan, mengimpun dan menyusun laporan LSPJ</p> <p>0.0.0.0.0. Jumlah bahan sistem informasi bidang peternakan yang disajikan</p> <p>Tersedianya dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu</p> <p>0.0.0.0.0. Jumlah usulan kegiatan SKPD yang disinkronkan dengan Renstra agar dapat tercapai sesuai rencana</p> <p>0.0.0.0.0. Jumlah RKA / RKA-KL SKPD yang disusun berdasarkan kebutuhan</p> <p>0.0.0.0.0. Jumlah asisten penyusunan RKA / dengan TAPD yang dilaksanakan</p> <p>0.0.0.0.0. Jumlah data DPA yang dimasukkan ke SIPKD sesuai dengan format dan ketentuan yang berlaku</p> <p>Tersedianya layanan hubungan kerja dengan unit kerja terkait</p>	<p><b>Pengelola Data Kepegawaian</b></p> <p>Tersedianya pelayanan Sisdin Informasi Kepegawaian</p> <p>0.0.0.0.0. Jumlah data pegawai di lingkungan Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat yang telah diselesaikan</p> <p>0.0.0.0.0. Jumlah keabsahan pegawai berdasarkan jumlah dan kompetensi kebutuhan di lingkungan Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat yang diselesaikan</p> <p><b>Fungsional Anjalis</b></p> <p>Terlaksananya pemeliharaan arsip dinas</p> <p>0.0.0.0.0. Jumlah arsip yang disusun sebagai bahan akuntabilitas kegiatan</p> <p><b>Penyimpanan Barang</b></p> <p>Terlaksananya administrasi Barang di Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat</p> <p>0.0.0.0.0. Jumlah pemeliharaan arsip dinas</p> <p>0.0.0.0.0. Jumlah penataan dan pengelaran Barang Milik Daerah di lingkungan Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat</p> <p><b>Pengadministrasi Keuangan</b></p> <p>Tersedianya dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu</p> <p>0.0.0.0.0. Jumlah penelitian terhadap kelengkapan pencairan sebagai bahan penerbitan SP2D</p> <p>0.0.0.0.0. Jumlah Pengajuan pencairan anggaran kegiatan yang diajukan sesuai dengan Anggaran Kas</p> <p>Tersedianya dokumen administrasi keuangan</p> <p>0.0.0.0.0. Jumlah laporan SP2D BPP yang dikoreksi</p> <p>Tersedianya dokumen pelaporan yang disusun tepat waktu</p> <p>0.0.0.0.0. Jumlah laporan/Surat Pertanggungjawaban (SPJ) pengeluaran yang dilaporkan secara administratif kepada penguasa anggaran</p> <p>0.0.0.0.0. Jumlah SPI yang diteliti</p> <p>Jumlah penatausahaan pembayaran/pengeluaran yang dilaksanakan</p>	<p><b>Bendahara Belanja Pegawai</b></p> <p>Terealisasi Administrasi Keuangan Bendahara Belanja Pegawai sesuai kebutuhan</p> <p>0.0.0.0.0. Jumlah kelengkapan dokumen pencairan yang terju</p> <p>Jumlah Kelengkapan SKPP yang terju</p> <p>Jumlah Klasifikasi Tunjangan – tunjangan yang terju</p> <p>Jumlah Klasifikasi Tunjangan – tunjangan yang terju</p> <p><b>Bendahara Peternakan</b></p> <p>Terealisasi Administrasi Keuangan sesuai kebutuhan (Pembukuan, penerimaan, penyetoran dan pelaporan keuangan) di Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat.</p> <p>0.0.0.0.0. Jumlah Pembukuan Penerimaan dan Penyetoran Pendapatan Daerah/Peternakan Daerah ke dalam Buku Kas Umum</p> <p><b>Bendahara Pengeluaran</b></p> <p>Terealisasi Administrasi Keuangan sesuai kebutuhan (Pembukuan, Penerimaan, Pengeluaran dan Pelaporan Pajak Keuangan)</p> <p>0.0.0.0.0. Jumlah Pengajuan Surat Perintah Pembayaran (SPI) yang akan diterbitkan menjadi SPJ dan diajukan ke Biro Keuangan Setda Prov. Jabar untuk diterbitkan SP2D</p> <p>Jumlah Penatausahaan Pembayaran/Pengeluaran (Belanja) yang dicatat ke dalam Buku Kas Umum, Buku Bank dari 89 Kegiatan</p> <p>Jumlah Laporan /Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Pengeluaran</p> <p>Terealisasi Administrasi Keuangan sesuai kebutuhan</p> <p>0.0.0.0.0. Jumlah Keabsahan transaksi (SPJ) permintaan Pembayaran yang di buat oleh BPP</p> <p>Jumlah SPM yang Sesuai nilai hasil perhitungan per objek yang akan diterbitkan pada SPM UPT, GU,LS dan TUP</p>
---	--	---	---	---	--	--	--	---	---	---	---	---	--	--

KEPALA BALAI PENGEMBANGAN PERIBITAN TERNAK UNGGAS JATIWANGI			
1.1.1	Jumlah produksi telur yang dihasilkan	Prosentase daya tetas ternak unggas di UPTD	80%
1.1.1.1	Jumlah rekomendasi kaji teras teknologi pakan ternak unggas		(4 rekomendasi)
1.1.2	Jumlah populasi ternak unggas		(16.500 ekor)
1.1.2.1	Prosentasi produksi telur harian ternak unggas di UPTD		68%
1.1.2.1	Jumlah bibit ternak unggas di UPTD yang berkualitas		(16.500 ekor)
1.1.2.2	Prosentase kematian ternak unggas di UPTD		10%
KEPALA SEKSI PENGUNJIAN			
KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN			
KEPALA SUB. BAGIAN TATA USAHA			
1.1.1.1	Prosentase daya tetas ternak unggas di UPTD (80%)	1.1.2.1	Prosentasi produksi telur harian ternak unggas di UPTD (68%)
1.1.1.1.1	Jumlah nenerapan teknologi reproduksi ternak unggas (1)	1.1.2.1.1	Jumlah produksi anak unggas umur sebar (100.000 di UPTD (32.700 ekor)
1.1.1.1.2	Jumlah kaji teras teknologi ternak unggas (1)	1.1.2.1.2	Jumlah pemeliharaan pakan ternak unggas di UPTD (4)
1.1.1.1.3	Jumlah kaji teras teknologi pakan ternak unggas (3)	1.1.2.2	Prosentase kematian ternak unggas di UPTD (10%)
1.1.2.1	Prosentasi produksi telur harian ternak unggas di UPTD (68%)	1.1.2.2.1	Jumlah pengasosan kesehatan ternak unggas di UPTD (3 penyakit)
1.1.2.1.1	Jumlah pengujian dan pengamatan dalam rangka pemurnian ternak unggas di UPTD		
Petugas Penetasan			
1.1.1.1.1	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan dengan koordinator ternak ayam buras dan tik	1.1.2.1.1	Jumlah tabulasi penetasan ternak unggas yang dilaksanakan meliputi seleksi telur, pemasukan telur, candling, dan perlakuan setelah menetas
1.1.1.1.2	Jumlah koordinasi dengan petugas penyimpanan barang pembantu dalam pencatatan keluar masuk pakan ternak ayam dan tik	1.1.2.1.1.1	Jumlah tabulasi pemeliharaan ternak unggas meliputi pemberian pakan, pemeliharaan kesehatan, pemeliharaan kesehatan ternak
1.1.1.1.3	Jumlah laporan ketesediaan bahan baku pakan yang ada di gudang pakan	1.1.2.1.1.1	Jumlah formulasi pakan ayam dan tik yang disusun sesuai periode umur
1.1.1.1.4	Jumlah formulasi pakan ayam dan tik yang disusun sesuai periode umur	1.1.2.1.1.1	Jumlah tugas ketatausahaan Sub Bagian Perencanaan dan Program yang dilaksanakan
1.1.1.1.5	Jumlah penimbangan pakan harian ternak ayam dan tik	1.1.2.1.1.1	Jumlah kebutuhan pakan dalam pelaksanaan pemeliharaan ternak unggas di balai
1.1.1.1.6	Jumlah kebutuhan pakan dengan populasi ternak ayam dan tik	1.1.2.1.1.1	Jumlah administrasi kepegawaian yang dilaksanakan
Medik Veteriner			
1.1.2.1.1	Tersedianya kegiatan peternakan ternak	1.1.2.1.1.1	Tersedianya pengingat produktivitas bibit ayam buras dan tik untuk pengujian
1.1.2.1.2	Jumlah formulasi pakan ayam dan tik yang disusun dalam rangka pengujian	1.1.2.1.1.1	Jumlah koordinasi dan evaluasi budidaya ternak unggas
1.1.2.1.3	Jumlah pemberian pakan ternak pengujian sesuai dengan recording ternak	1.1.2.1.1.1	Tersedianya penunasan jumlah kematian / mortalitas ternak
1.1.2.1.4	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan dengan Tim Unpad untuk seleksi ternak (ayam sesuai & tik random) periode layer	1.1.2.1.1.1	Jumlah jadwal kegiatan vaksinasi dan mediasi ternak unggas
1.1.2.1.5	Jumlah data teknis ternak pengujian	1.1.2.1.1.1	Jumlah jenis dan dosis pengobatan serta pengobatan ternak unggas
1.1.2.1.6	Jumlah hasil kegiatan pengujian ternak ayam sesuai & tik random kepada Tim Unpad	1.1.2.1.1.1	Jumlah Pengumpulan, pengolahan dan analisa data dibidang kesehatan hewan dan lingkungan
1.1.2.1.7	Jumlah monitoring dan evaluasi di bidang kesehatan hewan dan lingkungan	1.1.2.1.1.1	Jumlah monitoring dan evaluasi di bidang kesehatan hewan dan lingkungan

KEPALA BALAI PENGUNJIAN MUTU PAKAN TERNAK CIKOLE LEMBANG			
1.1.1	Jumlah produksi peternakan		(1050 rekomendasi)
1.1.1.1	Jumlah rekomendasi hasil pengujian mutu pakan dan bahan baku pakan ternak		(1050 rekomendasi)
1.1.1.2	Jumlah Jenis Pengujian yang masuk lingkup Akreditasi Laboratorium Pakan		(5 orang)
1.1.2	Jumlah Tenaga Penguji Laboratorium yang bersertifikat		(5 orang)
KEPALA SEKSI PELAYANAN TEKNIS			
KEPALA SEKSI PENYIAPAN SAMPLE			
KEPALA SUB. BAGIAN TATA USAHA			
1.1.1.1	Jumlah rekomendasi hasil pengujian mutu pakan dan bahan baku pakan ternak (1050 rekomendasi)	1.1.1.1.1	Jumlah pengujian analisis kalsium, NIR, air dan aflatoxin yang diuji secara laboratoris
1.1.1.1.1	Jumlah jenis petalihan bidang peternakan (8 jenis)	1.1.1.1.1.1	Jumlah pengujian analisis kalsium, NIR, air dan aflatoxin yang diuji secara laboratoris
1.1.1.1.2	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan (500 orang)	1.1.1.1.1.1	Jumlah pengujian analisis kalsium, NIR, air dan aflatoxin yang diuji secara laboratoris
1.1.1.1.3	Prosentase pemahaman peserta terhadap materi pelatihan bidang peternakan (55%)	1.1.1.1.1.1	Jumlah pengujian analisis kalsium, NIR, air dan aflatoxin yang diuji secara laboratoris
1.1.1.1.4	Jumlah alat-alat laboratorium yang dikalibrasi (18 unit)	1.1.1.1.1.1	Jumlah pengujian analisis kalsium, NIR, air dan aflatoxin yang diuji secara laboratoris
1.1.1.1.5	Jumlah dokumen akreditasi laboratorium (1 dokumen)	1.1.1.1.1.1	Jumlah pengujian analisis kalsium, NIR, air dan aflatoxin yang diuji secara laboratoris
1.1.1.1.6	Jumlah dokumen akreditasi laboratorium (1 dokumen)	1.1.1.1.1.1	Jumlah pengujian analisis kalsium, NIR, air dan aflatoxin yang diuji secara laboratoris
1.1.1.1.7	Jumlah dokumen akreditasi laboratorium (1 dokumen)	1.1.1.1.1.1	Jumlah pengujian analisis kalsium, NIR, air dan aflatoxin yang diuji secara laboratoris
1.1.1.1.8	Jumlah dokumen akreditasi laboratorium (1 dokumen)	1.1.1.1.1.1	Jumlah pengujian analisis kalsium, NIR, air dan aflatoxin yang diuji secara laboratoris
1.1.1.1.9	Jumlah dokumen akreditasi laboratorium (1 dokumen)	1.1.1.1.1.1	Jumlah pengujian analisis kalsium, NIR, air dan aflatoxin yang diuji secara laboratoris
1.1.1.1.10	Jumlah dokumen akreditasi laboratorium (1 dokumen)	1.1.1.1.1.1	Jumlah pengujian analisis kalsium, NIR, air dan aflatoxin yang diuji secara laboratoris
1.1.1.1.11	Jumlah dokumen akreditasi laboratorium (1 dokumen)	1.1.1.1.1.1	Jumlah pengujian analisis kalsium, NIR, air dan aflatoxin yang diuji secara laboratoris
1.1.1.1.12	Jumlah dokumen akreditasi laboratorium (1 dokumen)	1.1.1.1.1.1	Jumlah pengujian analisis kalsium, NIR, air dan aflatoxin yang diuji secara laboratoris
1.1.1.1.13	Jumlah dokumen akreditasi laboratorium (1 dokumen)	1.1.1.1.1.1	Jumlah pengujian analisis kalsium, NIR, air dan aflatoxin yang diuji secara laboratoris
1.1.1.1.14	Jumlah dokumen akreditasi laboratorium (1 dokumen)	1.1.1.1.1.1	Jumlah pengujian analisis kalsium, NIR, air dan aflatoxin yang diuji secara laboratoris
1.1.1.1.15	Jumlah dokumen akreditasi laboratorium (1 dokumen)	1.1.1.1.1.1	Jumlah pengujian analisis kalsium, NIR, air dan aflatoxin yang diuji secara laboratoris
1.1.1.1.16	Jumlah dokumen akreditasi laboratorium (1 dokumen)	1.1.1.1.1.1	Jumlah pengujian analisis kalsium, NIR, air dan aflatoxin yang diuji secara laboratoris
1.1.1.1.17	Jumlah dokumen akreditasi laboratorium (1 dokumen)	1.1.1.1.1.1	Jumlah pengujian analisis kalsium, NIR, air dan aflatoxin yang diuji secara laboratoris
1.1.1.1.18	Jumlah dokumen akreditasi laboratorium (1 dokumen)	1.1.1.1.1.1	Jumlah pengujian analisis kalsium, NIR, air dan aflatoxin yang diuji secara laboratoris
1.1.1.1.19	Jumlah dokumen akreditasi laboratorium (1 dokumen)	1.1.1.1.1.1	Jumlah pengujian analisis kalsium, NIR, air dan aflatoxin yang diuji secara laboratoris
1.1.1.1.20	Jumlah dokumen akreditasi laboratorium (1 dokumen)	1.1.1.1.1.1	Jumlah pengujian analisis kalsium, NIR, air dan aflatoxin yang diuji secara laboratoris
1.1.1.1.21	Jumlah dokumen akreditasi laboratorium (1 dokumen)	1.1.1.1.1.1	Jumlah pengujian analisis kalsium, NIR, air dan aflatoxin yang diuji secara laboratoris
1.1.1.1.22	Jumlah dokumen akreditasi laboratorium (1 dokumen)	1.1.1.1.1.1	Jumlah pengujian analisis kalsium, NIR, air dan aflatoxin yang diuji secara laboratoris
1.1.1.1.23	Jumlah dokumen akreditasi laboratorium (1 dokumen)	1.1.1.1.1.1	Jumlah pengujian analisis kalsium, NIR, air dan aflatoxin yang diuji secara laboratoris
1.1.1.1.24	Jumlah dokumen akreditasi laboratorium (1 dokumen)	1.1.1.1.1.1	Jumlah pengujian analisis kalsium, NIR, air dan aflatoxin yang diuji secara laboratoris
1.1.1.1.25	Jumlah dokumen akreditasi laboratorium (1 dokumen)	1.1.1.1.1.1	Jumlah pengujian analisis kalsium, NIR, air dan aflatoxin yang diuji secara laboratoris
1.1.1.1.26	Jumlah dokumen akreditasi laboratorium (1 dokumen)	1.1.1.1.1.1	Jumlah pengujian analisis kalsium, NIR, air dan aflatoxin yang diuji secara laboratoris
1.1.1.1.27	Jumlah dokumen akreditasi laboratorium (1 dokumen)	1.1.1.1.1.1	Jumlah pengujian analisis kalsium, NIR, air dan aflatoxin yang diuji secara laboratoris
1.1.1.1.28	Jumlah dokumen akreditasi laboratorium (1 dokumen)	1.1.1.1.1.1	Jumlah pengujian analisis kalsium, NIR, air dan aflatoxin yang diuji secara laboratoris
1.1.1.1.29	Jumlah dokumen akreditasi laboratorium (1 dokumen)	1.1.1.1.1.1	Jumlah pengujian analisis kalsium, NIR, air dan aflatoxin yang diuji secara laboratoris
1.1.1.1.30	Jumlah dokumen akreditasi laboratorium (1 dokumen)	1.1.1.1.1.1	Jumlah pengujian analisis kalsium, NIR, air dan aflatoxin yang diuji secara laboratoris
1.1.1.1.31	Jumlah dokumen akreditasi laboratorium (1 dokumen)	1.1.1.1.1.1	Jumlah pengujian analisis kalsium, NIR, air dan aflatoxin yang diuji secara laboratoris
1.1.1.1.32	Jumlah dokumen akreditasi laboratorium (1 dokumen)	1.1.1.1.1.1	Jumlah pengujian analisis kalsium, NIR, air dan aflatoxin yang diuji secara laboratoris
1.1.1.1.33	Jumlah dokumen akreditasi laboratorium (1 dokumen)	1.1.1.1.1.1	Jumlah pengujian analisis kalsium, NIR, air dan aflatoxin yang diuji secara laboratoris
1.1.1.1.34	Jumlah dokumen akreditasi laboratorium (1 dokumen)	1.1.1.1.1.1	Jumlah pengujian analisis kalsium, NIR, air dan aflatoxin yang diuji secara laboratoris
1.1.1.1.35	Jumlah dokumen akreditasi laboratorium (1 dokumen)	1.1.1.1.1.1	Jumlah pengujian analisis kalsium, NIR, air dan aflatoxin yang diuji secara laboratoris
1.1.1.1.36	Jumlah dokumen akreditasi laboratorium (1 dokumen)	1.1.1.1.1.1	Jumlah pengujian analisis kalsium, NIR, air dan aflatoxin yang diuji secara laboratoris
1.1.1.1.37	Jumlah dokumen akreditasi laboratorium (1 dokumen)	1.1.1.1.1.1	Jumlah pengujian analisis kalsium, NIR, air dan aflatoxin yang diuji secara laboratoris
1.1.1.1.38	Jumlah dokumen akreditasi laboratorium (1 dokumen)	1.1.1.1.1.1	Jumlah pengujian analisis kalsium, NIR, air dan aflatoxin yang diuji secara laboratoris
1.1.1.1.39	Jumlah dokumen akreditasi laboratorium (1 dokumen)	1.1.1.1.1.1	Jumlah pengujian analisis kalsium, NIR, air dan aflatoxin yang diuji secara laboratoris
1.1.1.1.40	Jumlah dokumen akreditasi laboratorium (1 dokumen)	1.1.1.1.1.1	Jumlah pengujian analisis kalsium, NIR, air dan aflatoxin yang diuji secara laboratoris
1.1.1.1.41	Jumlah dokumen akreditasi laboratorium (1 dokumen)	1.1.1.1.1.1	Jumlah pengujian analisis kalsium, NIR, air dan aflatoxin yang diuji secara laboratoris
1.1.1.1.42	Jumlah dokumen akreditasi laboratorium (1 dokumen)	1.1.1.1.1.1	Jumlah pengujian analisis kalsium, NIR, air dan aflatoxin yang diuji secara laboratoris
1.1.1.1.43	Jumlah dokumen akreditasi laboratorium (1 dokumen)	1.1.1.1.1.1	Jumlah pengujian analisis kalsium, NIR, air dan aflatoxin yang diuji secara laboratoris
1.1.1.1.44	Jumlah dokumen akreditasi laboratorium (1 dokumen)	1.1.1.1.1.1	Jumlah pengujian analisis kalsium, NIR, air dan aflatoxin yang diuji secara laboratoris
1.1.1.1.45	Jumlah dokumen akreditasi laboratorium (1 dokumen)	1.1.1.1.1.1	Jumlah pengujian analisis kalsium, NIR, air dan aflatoxin yang diuji secara laboratoris
1.1.1.1.46	Jumlah dokumen akreditasi laboratorium (1 dokumen)	1.1.1.1.1.1	Jumlah pengujian analisis kalsium, NIR, air dan aflatoxin yang diuji secara laboratoris
1.1.1.1.47	Jumlah dokumen akreditasi laboratorium (1 dokumen)	1.1.1.1.1.1	Jumlah pengujian analisis kalsium, NIR, air dan aflatoxin yang diuji secara laboratoris
1.1.1.1.48	Jumlah dokumen akreditasi laboratorium (1 dokumen)	1.1.1.1.1.1	Jumlah pengujian analisis kalsium, NIR, air dan aflatoxin yang diuji secara laboratoris
1.1.1.1.49	Jumlah dokumen akreditasi laboratorium (1 dokumen)	1.1.1.1.1.1	Jumlah pengujian analisis kalsium, NIR, air dan aflatoxin yang diuji secara laboratoris
1.1.1.1.50	Jumlah dokumen akreditasi laboratorium (1 dokumen)	1.1.1.1.1.1	Jumlah pengujian analisis kalsium, NIR, air dan aflatoxin yang diuji secara laboratoris
1.1.1.1.51	Jumlah dokumen akreditasi laboratorium (1 dokumen)	1.1.1.1.1.1	Jumlah pengujian analisis kalsium, NIR, air dan aflatoxin yang diuji secara laboratoris
1.1.1.1.52	Jumlah dokumen akreditasi laboratorium (1 dokumen)	1.1.1.1.1.1	Jumlah pengujian analisis kalsium, NIR, air dan aflatoxin yang diuji secara laboratoris
1.1.1.1.53	Jumlah dokumen akreditasi laboratorium (1 dokumen)	1.1.1.1.1.1	Jumlah pengujian analisis kalsium, NIR, air dan aflatoxin yang diuji secara laboratoris
1.1.1.1.54	Jumlah dokumen akreditasi laboratorium (1 dokumen)	1.1.1.1.1.1	Jumlah pengujian analisis kalsium, NIR, air dan aflatoxin yang diuji secara laboratoris
1.1.1.1.55	Jumlah dokumen akreditasi laboratorium (1 dokumen)	1.1.1.1.1.1	Jumlah pengujian analisis kalsium, NIR, air dan aflatoxin yang diuji secara laboratoris
1.1.1.1.56	Jumlah dokumen akreditasi laboratorium (1 dokumen)	1.1.1.1.1.1	Jumlah pengujian analisis kalsium, NIR, air dan aflatoxin yang diuji secara laboratoris
1.1.1.1.57	Jumlah dokumen akreditasi laboratorium (1 dokumen)	1.1.1.1.1.1	Jumlah pengujian analisis kalsium, NIR, air dan aflatoxin yang diuji secara laboratoris
1.1.1.1.58	Jumlah dokumen akreditasi laboratorium (1 dokumen)	1.1.1.1.1.1	Jumlah pengujian analisis kalsium, NIR, air dan aflatoxin



KEPALA BALAI PENGEMBANGAN TERNAK SAPI PERAH DAN HIAUAN MAKANAN TERNAK CIKOLE LEMBANG				KEPALA BALAI PERBIBITAN DAN PENGEMBANGAN INSEMINASI BUATAN TERNAK SAPI PERAH BUNIKASH				KEPALA BALAI PENGEMBANGAN PERBIBITAN TERNAK SAPI POTONG CIAMIS				KEPALA BALAI PENGEMBANGAN PERBIBITAN TERNAK DOMBA MARGAWATI																	
1.1.1	Jumlah produksi susu yang dihasilkan	(300 ton)	1.1.2	Jumlah populasi ternak sapi	(250 ekor)	1.1.2	Jumlah populasi ternak sapi	(375 ekor)	1.1.1	Jumlah produksi daging yang dihasilkan	(465 ton)	1.1.1	Angka pertumbuhan berat badan ternak kambing	(465 ton)															
1.1.1.1	Jumlah rekomendasi formula pakan ternak sapi perah (5 dokumen)	(5 dokumen)	1.1.2.1	-	50%	1.1.2.1	Prosentase kelahiran ternak sapi perah di UPTD	50%	1.1.2.1	Angka pertumbuhan berat badan ternak kambing	(300 ekor)	1.1.2.1	Angka pertumbuhan berat badan ternak kambing	(300 ekor)															
1.1.1.1.1	Jumlah populasi ternak sapi perah	(220 ekor)	1.1.2.2	Jumlah ternak sapi perah di UPTD	(240 ekor)	1.1.2.2	Jumlah ternak sapi potong di UPTD	1,50%	1.1.2.2	Jumlah populasi ternak kambing	(600 ekor)	1.1.2.2	Jumlah populasi ternak kambing	(600 ekor)															
1.1.2.1.1	Prosentase kelahiran ternak sapi perah	64%	1.1.2.2.1	Prosentase kematian ternak sapi perah di UPTD	4%	1.1.2.2.1	Prosentase kematian ternak sapi potong di UPTD	1,50%	1.1.2.2.1	Prosentase kelahiran ternak kambing	100%	1.1.2.2.1	Prosentase kelahiran ternak kambing	100%															
1.1.2.2.1	Jumlah ternak sapi perah di UPTD	92,10%	1.1.2.2.2	Prosentase kematian ternak sapi perah di UPTD	4%	1.1.2.2.2	Prosentase kematian ternak sapi potong di UPTD	1,50%	1.1.2.2.2	Jumlah ternak domba di UPTD	100 ekor	1.1.2.2.2	Prosentase ternak domba di UPTD	100%															
1.1.2.2.2	Prosentase kematian ternak sapi perah di UPTD	4%	1.1.2.2.2	Prosentase kematian ternak sapi perah di UPTD	4%	1.1.2.2.2	Prosentase kematian ternak sapi potong di UPTD	1,50%	1.1.2.2.2	Prosentase ternak domba di UPTD	100%	1.1.2.2.2	Prosentase ternak domba di UPTD	100%															
KEPALA SEKSI PENGUNJIAN				KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN				KEPALA SUB. BAGIAN TATA USAHA				KEPALA SEKSI PENGUNJIAN				KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN				KEPALA SUB. BAGIAN TATA USAHA									
1.1.1.1.1	Jumlah rekomendasi formula pakan ternak sapi perah (5 dokumen)	1.1.2.1.1	Prosentase kelahiran ternak sapi perah di UPTD (64%)	0.0.0.0	Prosentase pengelolaan administrasi keuangan dan aset yang tertera dan terakut	1.1.2.1.1	Prosentase kelahiran ternak sapi perah di UPTD (62%)	0.0.0.0	Prosentase pengelolaan administrasi keuangan dan aset yang tertera dan terakut	1.1.2.1.1	Prosentase kelahiran ternak sapi potong di UPTD (30%)	0.0.0.0	Prosentase kelahiran ternak sapi potong di UPTD (30%)	0.0.0.0	Prosentase pengelolaan administrasi keuangan dan aset yang tertera dan terakut	1.1.1.1.1	Angka pertumbuhan berat badan ternak kambing	1.1.2.1.1	Prosentase kelahiran ternak domba di UPTD (10%)	0.0.0.0	Prosentase pengelolaan administrasi keuangan dan aset yang tertera dan terakut	1.1.1.1.1	Angka pertumbuhan berat badan ternak kambing	1.1.2.1.1	Prosentase kelahiran ternak domba di UPTD (10%)	0.0.0.0	Prosentase pengelolaan administrasi keuangan dan aset yang tertera dan terakut		
1.1.1.1.1.1	Jumlah pengujian pakan sapi perah (Bonsentrat dan hijauan pakan ternak)	1.1.2.1.1.1	Angka service per conception sapi perah di UPTD (1,6)	0.0.0.0	Prosentase pelayanan administrasi kepegawaian tepat waktu	1.1.2.1.1.1	Angka calving interval sapi perah di UPTD (14%)	0.0.0.0	Prosentase pelayanan administrasi kepegawaian tepat waktu	1.1.2.1.1.1	Angka service per conception sapi potong di UPTD (1,8)	0.0.0.0	Angka service per conception sapi potong di UPTD (1,8)	0.0.0.0	Prosentase pelayanan administrasi kepegawaian tepat waktu	1.1.1.1.1.1	Jumlah pengujian pakan domba (Bonsentrat dan hijauan pakan ternak)	1.1.2.1.1.1	Prosentase kelahiran ternak domba di UPTD (92,5%)	0.0.0.0	Prosentase pelayanan administrasi kepegawaian tepat waktu	1.1.1.1.1.1	Jumlah pengujian pakan domba (Bonsentrat dan hijauan pakan ternak)	1.1.2.1.1.1	Prosentase kelahiran ternak domba di UPTD (92,5%)	0.0.0.0	Prosentase pelayanan administrasi kepegawaian tepat waktu		
1.1.1.1.2	Jumlah kali terapi teknologi pakan (1 kali)	1.1.2.1.2	Angka conception rate/angka kebuntingan ternak sapi perah di UPTD (61)	0.0.0.0	Prosentase fasilitas layanan administrasi kantor sesuai SOP	1.1.2.1.2	Jumlah pengujian mutu bibit ternak sapi perah di UPTD dalam rangka seleksi calon bibit(23 sampel)	0.0.0.0	Prosentase fasilitas layanan administrasi kantor sesuai SOP	1.1.2.1.2	Angka conception rate/angka kebuntingan ternak sapi potong di UPTD (60)	0.0.0.0	Angka conception rate/angka kebuntingan ternak sapi potong di UPTD (60)	0.0.0.0	Prosentase fasilitas layanan administrasi kantor sesuai SOP	1.1.1.1.2	Jumlah kali terapi teknologi pakan (3 paket)	1.1.2.1.2	Prosentase ternak domba yang lahir hidup (Lams Crog) di UPTD (105%)	0.0.0.0	Prosentase fasilitas layanan administrasi kantor sesuai SOP	1.1.1.1.2	Jumlah kali terapi teknologi pakan (3 paket)	1.1.2.1.2	Prosentase ternak domba yang lahir hidup (Lams Crog) di UPTD (105%)	0.0.0.0	Prosentase fasilitas layanan administrasi kantor sesuai SOP		
1.1.2.1	Prosentase kelahiran ternak sapi perah di UPTD (64%)	1.1.2.2	Prosentase kematian ternak sapi perah di UPTD (4%)	0.0.0.0	Prosentase penanganan kesehatan dan gangguan reproduksi sapi perah di UPTD (4 jenis)	1.1.2.2.1	Prosentase kematian ternak sapi perah di UPTD (5%)	0.0.0.0	Prosentase penanganan kesehatan dan gangguan reproduksi sapi perah di UPTD (5 jenis)	1.1.2.2.1	Prosentase kematian ternak sapi potong di UPTD (1,5%)	0.0.0.0	Prosentase kematian ternak sapi potong di UPTD (1,5%)	0.0.0.0	Prosentase penanganan kesehatan dan gangguan reproduksi sapi potong di UPTD (2 jenis)	1.1.2.1.1	Prosentase kelahiran ternak domba di UPTD (110%)	1.1.2.2.1	Jumlah bibit induk ternak domba di UPTD yang produktif (1650 ekor)	0.0.0.0	Prosentase penanganan kesehatan dan gangguan reproduksi sapi perah di UPTD (4 jenis)	1.1.2.2.1	Prosentase kelahiran ternak domba di UPTD (110%)	0.0.0.0	Prosentase penanganan kesehatan dan gangguan reproduksi sapi potong di UPTD (2 jenis)	1.1.2.2.1	Prosentase kelahiran ternak domba di UPTD (110%)	0.0.0.0	Prosentase penanganan kesehatan dan gangguan reproduksi sapi potong di UPTD (2 jenis)
1.1.2.1.1	Angka calving interval sapi perah di UPTD (14%)	1.1.2.2.1	Jumlah penanganan kesehatan dan gangguan reproduksi sapi perah di UPTD (4 jenis)	1.1.2.2.1	Jumlah penanganan kesehatan dan gangguan reproduksi sapi perah di UPTD (5 jenis)	1.1.2.2.1	Jumlah penanganan kesehatan dan gangguan reproduksi sapi perah di UPTD (5 jenis)	1.1.2.2.1	Jumlah penanganan kesehatan dan gangguan reproduksi sapi perah di UPTD (5 jenis)	1.1.2.2.1	Jumlah penanganan kesehatan dan gangguan reproduksi sapi potong di UPTD (2 jenis)	1.1.2.2.1	Jumlah penanganan kesehatan dan gangguan reproduksi sapi potong di UPTD (2 jenis)	1.1.2.2.1	Jumlah penanganan kesehatan dan gangguan reproduksi sapi potong di UPTD (2 jenis)	1.1.2.2.1	Jumlah penanganan kesehatan dan gangguan reproduksi sapi potong di UPTD (2 jenis)	1.1.2.2.1	Jumlah penanganan kesehatan dan gangguan reproduksi sapi potong di UPTD (2 jenis)	1.1.2.2.1	Jumlah penanganan kesehatan dan gangguan reproduksi sapi potong di UPTD (2 jenis)	1.1.2.2.1	Jumlah penanganan kesehatan dan gangguan reproduksi sapi potong di UPTD (2 jenis)	1.1.2.2.1	Jumlah penanganan kesehatan dan gangguan reproduksi sapi potong di UPTD (2 jenis)	1.1.2.2.1	Jumlah penanganan kesehatan dan gangguan reproduksi sapi potong di UPTD (2 jenis)	1.1.2.2.1	Jumlah penanganan kesehatan dan gangguan reproduksi sapi potong di UPTD (2 jenis)
1.1.2.2	Jumlah populasi ternak sapi perah	1.1.2.2.2	Prosentase kematian ternak sapi perah di UPTD (4%)	1.1.2.2.2	Prosentase kematian ternak sapi perah di UPTD (4%)	1.1.2.2.2	Prosentase kematian ternak sapi perah di UPTD (4%)	1.1.2.2.2	Prosentase kematian ternak sapi perah di UPTD (4%)	1.1.2.2.2	Prosentase kematian ternak sapi potong di UPTD (1,5%)	1.1.2.2.2	Prosentase kematian ternak sapi potong di UPTD (1,5%)	1.1.2.2.2	Prosentase kematian ternak sapi potong di UPTD (1,5%)	1.1.2.2.2	Prosentase kematian ternak sapi potong di UPTD (1,5%)	1.1.2.2.2	Prosentase kematian ternak sapi potong di UPTD (1,5%)	1.1.2.2.2	Prosentase kematian ternak sapi potong di UPTD (1,5%)	1.1.2.2.2	Prosentase kematian ternak sapi potong di UPTD (1,5%)	1.1.2.2.2	Prosentase kematian ternak sapi potong di UPTD (1,5%)	1.1.2.2.2	Prosentase kematian ternak sapi potong di UPTD (1,5%)	1.1.2.2.2	Prosentase kematian ternak sapi potong di UPTD (1,5%)
1.1.2.2.2	Jumlah populasi ternak sapi perah	1.1.2.2.2	Prosentase kematian ternak sapi perah di UPTD (4%)	1.1.2.2.2	Prosentase kematian ternak sapi perah di UPTD (4%)	1.1.2.2.2	Prosentase kematian ternak sapi perah di UPTD (4%)	1.1.2.2.2	Prosentase kematian ternak sapi perah di UPTD (4%)	1.1.2.2.2	Prosentase kematian ternak sapi potong di UPTD (1,5%)	1.1.2.2.2	Prosentase kematian ternak sapi potong di UPTD (1,5%)	1.1.2.2.2	Prosentase kematian ternak sapi potong di UPTD (1,5%)	1.1.2.2.2	Prosentase kematian ternak sapi potong di UPTD (1,5%)	1.1.2.2.2	Prosentase kematian ternak sapi potong di UPTD (1,5%)	1.1.2.2.2	Prosentase kematian ternak sapi potong di UPTD (1,5%)	1.1.2.2.2	Prosentase kematian ternak sapi potong di UPTD (1,5%)	1.1.2.2.2	Prosentase kematian ternak sapi potong di UPTD (1,5%)	1.1.2.2.2	Prosentase kematian ternak sapi potong di UPTD (1,5%)	1.1.2.2.2	Prosentase kematian ternak sapi potong di UPTD (1,5%)
1.1.2.2.2	Jumlah populasi ternak sapi perah	1.1.2.2.2	Prosentase kematian ternak sapi perah di UPTD (4%)	1.1.2.2.2	Prosentase kematian ternak sapi perah di UPTD (4%)	1.1.2.2.2	Prosentase kematian ternak sapi perah di UPTD (4%)	1.1.2.2.2	Prosentase kematian ternak sapi perah di UPTD (4%)	1.1.2.2.2	Prosentase kematian ternak sapi potong di UPTD (1,5%)	1.1.2.2.2	Prosentase kematian ternak sapi potong di UPTD (1,5%)	1.1.2.2.2	Prosentase kematian ternak sapi potong di UPTD (1,5%)	1.1.2.2.2	Prosentase kematian ternak sapi potong di UPTD (1,5%)	1.1.2.2.2	Prosentase kematian ternak sapi potong di UPTD (1,5%)	1.1.2.2.2	Prosentase kematian ternak sapi potong di UPTD (1,5%)	1.1.2.2.2	Prosentase kematian ternak sapi potong di UPTD (1,5%)	1.1.2.2.2	Prosentase kematian ternak sapi potong di UPTD (1,5%)	1.1.2.2.2	Prosentase kematian ternak sapi potong di UPTD (1,5%)	1.1.2.2.2	Prosentase kematian ternak sapi potong di UPTD (1,5%)
1.1.2.2.2	Jumlah populasi ternak sapi perah	1.1.2.2.2	Prosentase kematian ternak sapi perah di UPTD (4%)	1.1.2.2.2	Prosentase kematian ternak sapi perah di UPTD (4%)	1.1.2.2.2	Prosentase kematian ternak sapi perah di UPTD (4%)	1.1.2.2.2	Prosentase kematian ternak sapi perah di UPTD (4%)	1.1.2.2.2	Prosentase kematian ternak sapi potong di UPTD (1,5%)	1.1.2.2.2	Prosentase kematian ternak sapi potong di UPTD (1,5%)	1.1.2.2.2	Prosentase kematian ternak sapi potong di UPTD (1,5%)	1.1.2.2.2	Prosentase kematian ternak sapi potong di UPTD (1,5%)	1.1.2.2.2	Prosentase kematian ternak sapi potong di UPTD (1,5%)	1.1.2.2.2	Prosentase kematian ternak sapi potong di UPTD (1,5%)	1.1.2.2.2	Prosentase kematian ternak sapi potong di UPTD (1,5%)	1.1.2.2.2	Prosentase kematian ternak sapi potong di UPTD (1,5%)	1.1.2.2.2	Prosentase kematian ternak sapi potong di UPTD (1,5%)	1.1.2.2.2	Prosentase kematian ternak sapi potong di UPTD (1,5%)
1.1.2.2.2	Jumlah populasi ternak sapi perah	1.1.2.2.2	Prosentase kematian ternak sapi perah di UPTD (4%)	1.1.2.2.2	Prosentase kematian ternak sapi perah di UPTD (4%)	1.1.2.2.2	Prosentase kematian ternak sapi perah di UPTD (4%)	1.1.2.2.2	Prosentase kematian ternak sapi perah di UPTD (4%)	1.1.2.2.2	Prosentase kematian ternak sapi potong di UPTD (1,5%)	1.1.2.2.2	Prosentase kematian ternak sapi potong di UPTD (1,5%)	1.1.2.2.2	Prosentase kematian ternak sapi potong di UPTD (1,5%)	1.1.2.2.2	Prosentase kematian ternak sapi potong di UPTD (1,5%)	1.1.2.2.2	Prosentase kematian ternak sapi potong di UPTD (1,5%)	1.1.2.2.2	Prosentase kematian ternak sapi potong di UPTD (1,5%)	1.1.2.2.2	Prosentase kematian ternak sapi potong di UPTD (1,5%)	1.1.2.2.2	Prosentase kematian ternak sapi potong di UPTD (1,5%)	1.1.2.2.2	Prosentase kematian ternak sapi potong di UPTD (1,5%)	1.1.2.2.2	Prosentase kematian ternak sapi potong di UPTD (1,5%)
1.1.2.2.2	Jumlah populasi ternak sapi perah	1.1.2.2.2	Prosentase kematian ternak sapi perah di UPTD (4%)	1.1.2.2.2	Prosentase kematian ternak sapi perah di UPTD (4%)	1.1.2.2.2	Prosentase kematian ternak sapi perah di UPTD (4%)	1.1.2.2.2	Prosentase kematian ternak sapi perah di UPTD (4%)	1.1.2.2.2	Prosentase kematian ternak sapi potong di UPTD (1,5%)	1.1.2.2.2	Prosentase kematian ternak sapi potong di UPTD (1,5%)	1.1.2.2.2	Prosentase kematian ternak sapi potong di UPTD (1,5%)	1.1.2.2.2	Prosentase kematian ternak sapi potong di UPTD (1,5%)	1.1.2.2.2	Prosentase kematian ternak sapi potong di UPTD (1,5%)	1.1.2.2.2	Prosentase kematian ternak sapi potong di UPTD (1,5%)	1.1.2.2.2	Prosentase kematian ternak sapi potong di UPTD (1,5%)	1.1.2.2.2	Prosentase kematian ternak sapi potong di UPTD (1,5%)	1.1.2.2.2	Prosentase kematian ternak sapi potong di UPTD (1,5%)	1.1.2.2.2	Prosentase kematian ternak sapi potong di UPTD (1,5%)
1.1.2.2.2	Jumlah populasi ternak sapi perah	1.1.2.2.2	Prosentase kematian ternak sapi perah di UPTD (4%)	1.1.2.2.2	Prosentase kematian ternak sapi perah di UPTD (4%)	1.1.2.2.2	Prosentase kematian ternak sapi perah di UPTD (4%)	1.1.2.2.2	Prosentase kematian ternak sapi perah di UPTD (4%)	1.1.2.2.2	Prosentase kematian ternak sapi potong di UPTD (1,5%)	1.1.2.2.2	Prosentase kematian ternak sapi potong di UPTD (1,5%)	1.1.2.2.2	Prosentase kematian ternak sapi potong di UPTD (1,5%)	1.1.2.2.2	Prosentase kematian ternak sapi potong di UPTD (1,5%)	1.1.2.2.2	Prosentase kematian ternak sapi potong di UPTD (1,5%)	1.1.2.2.2	Prosentase kematian ternak sapi potong di UPTD (1,5%)	1.1.2.2.2	Prosentase kematian ternak sapi potong di UPTD (1,5%)	1.1.2.2.2	Prosentase kematian ternak sapi potong di UPTD (1,5%)	1.1.2.2.2	Prosentase kematian ternak sapi potong di UPTD (1,5%)	1.1.2.2.2	Prosentase kematian ternak sapi potong di UPTD (1,5%)
1.1.2.2.2	Jumlah populasi ternak sapi perah	1.1.2.2.2	Prosentase kematian ternak sapi perah di UPTD (4%)	1.1.2.2.2	Prosentase kematian ternak sapi perah di UPTD (4%)	1.1.2.2.2	Prosentase kematian ternak sapi perah di UPTD (4%)	1.1.2.2.2	Prosentase kematian ternak sapi perah di UPTD (4%)	1.1.2.2.2	Prosentase kematian ternak sapi potong di UPTD (1,5%)	1.1.2.2.2	Prosentase kematian ternak sapi potong di UPTD (1,5%)	1.1.2.2.2	Prosentase kematian ternak sapi potong di UPTD (1,5%)	1.1.2.2.2	Prosentase kematian ternak sapi potong di UPTD (1,5%)	1.1.2.2.2	Prosentase kematian ternak sapi potong di UPTD (1,5%)	1.1.2.2.2	Prosentase kematian ternak sapi potong di UPTD (1,5%)	1.1.2.2.2	Prosentase kematian ternak sapi potong di UPTD (1,5%)	1.1.2.2.2	Prosentase kematian ternak sapi potong di UPTD (1,5%)	1.1.2.2.2	Prosentase kematian ternak sapi potong di UPTD (1,5%)	1.1.2.2.2	Prosentase kematian ternak sapi potong di UPTD (1,5%)
1.1.2.2.2	Jumlah populasi ternak sapi perah	1.1.2.2.2	Prosentase kematian ternak sapi perah di UPTD (4%)	1.1.2.2.2	Prosentase kematian ternak sapi perah di UPTD (4%)	1.1.2.2.2	Prosentase kematian ternak sapi perah di UPTD (4%)	1.1.2.2.2	Prosentase kematian ternak sapi perah di UPTD (4%)	1.1.2.2.2	Prosentase kematian ternak sapi potong di UPTD (1,5%)	1.1.2.2.2	Prosentase kematian ternak sapi potong di UPTD (1,5%)	1.1.2.2.2	Prosentase kematian ternak sapi potong di UPTD (1,5%)	1.1.2.2.2	Prosentase kematian ternak sapi potong di UPTD (1,5%)	1.1.2.2.2	Prosentase kematian ternak sapi potong di UPTD (1,5%)	1.1.2.2.2	Prosentase kematian ternak sapi potong di UPTD (1,5%)	1.1.2.2.2	Prosentase kematian ternak sapi potong di UPTD (1,5%)	1.1.2.2.2	Prosentase kematian ternak sapi potong di UPTD (1,5%)	1.1.2.2.2	Prosentase kematian ternak sapi potong di UPTD (1,5%)	1.1.2.2.2	Prosentase kematian ternak sapi potong di UPTD (1,5%)
1.1.2.2.2	Jumlah populasi ternak sapi perah	1.1.2.2.2	Prosentase kematian ternak sapi perah di UPTD (4%)	1.1.2.2.2	Prosentase kematian ternak sapi perah di UPTD (4%)	1.1.2.2.2	Prosentase kematian ternak sapi perah di UPTD (4%)	1.1.2.2.2	Prosentase kematian ternak sapi perah di UPTD (4%)	1.1.2.2.2	Prosentase kematian ternak sapi potong di UPTD (1,5%)	1.1.2.2.2	Prosentase kematian ternak sapi potong di UPTD (1,5%)	1.1.2.2.2	Prosentase kematian ternak sapi potong di UPTD (1,5%)	1.1.2.2.2	Prosentase kematian ternak sapi potong di UPTD (1,5%)	1.1.2.2.2	Prosentase kematian ternak sapi potong di UPTD (1,5%)	1.1.2.2.2	Prosentase kematian ternak sapi potong di UPTD (1,5%)	1.1.2.2.2	Prosentase kematian ternak sapi potong di UPTD (1,5%)	1.1.2.2.2	Prosentase kematian ternak sapi potong di UPTD (1,5%)	1.1.2.2.2	Prosentase kematian ternak sapi potong di UPTD (1,5%)	1.1.2.2.2	Prosentase kematian ternak sapi potong di UPTD (1,5%)
1.1.2.2.2	Jumlah populasi ternak sapi perah	1.1.2.2.2	Prosentase kematian ternak sapi perah di UPTD (4%)	1.1.2.2.2	Prosentase kematian ternak sapi perah di UPTD (4%)	1.1.2.2.2	Prosentase kematian ternak sapi perah di UPTD (4%)	1.1.2.2.2	Prosentase kematian ternak sapi perah di UPTD (4%)	1.1.2.2.2	Prosentase kematian ternak sapi potong di UPTD (1,5%)	1.1.2.2.2	Prosentase kematian ternak sapi potong di UPTD (1,5%)	1.1.2.2.2	Prosentase kematian ternak sapi potong di UPTD (1,5%)	1.1.2.2.2	Prosentase kematian ternak sapi potong di UPTD (1,5%)	1.1.2.2.2	Prosentase kematian ternak sapi potong di UPTD (1,5%)	1.1.2.2.2	Prosentase kematian ternak sapi potong di UPTD (1,5%)	1.1.2.2.2	Prosentase kematian ternak sapi potong di UPTD (1,5%)	1.1.2.2.2	Prosentase kematian ternak sapi potong di UPTD (1,5%)	1.1.2.2.2	Prosentase kematian ternak sapi potong di UPTD (1,5%)	1.1.2.2.2	Prosentase kematian ternak sapi potong di UPTD (1,5%)
1.1.2.2.2	Jumlah populasi ternak sapi perah	1.1.2.2.2	Prosentase kematian ternak sapi perah di UPTD (4%)	1.1.2.2.2	Prosentase kematian ternak sapi perah di UPTD (4%)	1.1.2.2.2	Prosentase kematian ternak sapi perah di UPTD (4%)	1.1.2.2.2	Prosentase kematian ternak sapi perah di UPTD (4%)	1.1.2.2.2	Prosentase kematian ternak sapi potong di UPTD (1,5%)	1.1.2.2.2	Prosentase kematian ternak sapi potong di UPTD (1,5%)	1.1.2.2.2	Prosentase kematian ternak sapi potong di UPTD (1,5%)	1.1.2.2.2	Prosentase kematian ternak sapi potong di UPTD (1,5%)	1.1.2.2.2	Prosentase kematian ternak sapi potong di UPTD (1,5%)	1.1.2.2.2	Prosentase kematian ternak sapi potong di UPTD (1,5%)	1.1.2.2.2	Prosentase kematian ternak sapi potong di UPTD (1,5%)	1.1.2.2.2	Prosentase kematian ternak sapi potong di UPTD (1,5%)	1.1.2.2.2	Prosentase kematian ternak sapi potong di UPTD (1,5%)	1.1.2.2.2	Prosentase kematian ternak sapi potong di UPTD (1,5%)
1.1.2.2.2	Jumlah populasi ternak sapi perah	1.1.2.2.2	Prosentase kematian ternak sapi perah di UPTD (4%)	1.1.2.2.2	Prosentase kematian ternak sapi perah di UPTD (4%)	1.1.2.2.2	Prosentase kematian ternak sapi perah di UPTD (4%)	1.1.2.2.2	Prosentase kematian ternak sapi perah di UPTD (4%)	1.1.2.2.2	Prosentase kematian ternak sapi potong di UPTD (1,5%)	1.1.2.2.2	Prosentase kematian ternak sapi potong di UPTD (1,5%)	1.1.2.2.2	Prosentase kematian ternak sapi potong di UPTD (1,5%)	1.1.2.2.2	Prosentase kematian ternak sapi potong di UPTD (1,5%)	1.1.2.2.2	Prosentase kematian ternak sapi potong di UPTD (1,5%)	1.1.2.2.2	Prosentase kematian ternak sapi potong di UPTD (1,5%)	1.1.2.2.2	Prosentase kematian ternak sapi potong di UPTD (1,5%)	1.1.2.2.2	Prosentase kematian ternak sapi potong di UPTD (1,5%)	1.1.2.2.2	Prosentase kematian ternak sapi potong di UPTD (1,5%)	1.1.2.2.2	Prosentase kematian ternak sapi potong di UPTD (1,5%)
1.1.2.2.2	Jumlah populasi ternak sapi perah	1.1.2.2.2	Prosentase kematian ternak sapi perah di UPTD (4%)	1.1.2.2.2	Prosentase kematian ternak sapi perah di UPTD (4%)	1.1.2.2.2	Prosentase kematian ternak sapi perah di UPTD (4%)	1.1.2.2.2	Prosentase kematian ternak sapi perah di UPTD (4%)	1.1.2.2.2	Prosentase kematian ternak sapi potong di UPTD (1,5%)	1.1.2.2.2	Prosentase kematian ternak sapi potong di UPTD (1,5%)	1.1.2.2.2	Prosentase kematian ternak sapi potong di UPTD (1,5%)	1.1.2.2.2	Prosentase kematian ternak sapi potong di UPTD (1,5%)	1.1.2.2.2	Prosentase kematian ternak sapi potong di UPTD (1,5%)	1.1.2.2.2	Prosentase kematian ternak sapi potong di UPTD (1,5%)	1.1.2.2.2	Prosentase kematian ternak sapi potong di UPTD (1,5%)	1.1.2.2.2	Prosentase kematian ternak sapi potong di UPTD (1,5%)	1.1.2.2.2	Prosentase kematian ternak sapi potong di UPTD (1,5%)	1.1.2.2.2	Prosentase kematian ternak sapi potong di UPTD (1,5%)
1.1.2.2.2	Jumlah populasi ternak sapi perah	1.1.2.2.2	Prosentase kematian ternak sapi perah di UPTD (4%)	1.1.2.2.2	Prosentase kematian ternak sapi perah di UPTD (4%)	1.1.2.2.2	Prosentase kematian ternak sapi perah di UPTD (4%)	1.1.2.2.2	Prosentase kematian ternak sapi perah di UPTD (4%)	1.1.2.2.2	Prosentase kematian ternak sapi potong di UPTD (1,5%)	1.1.2.2.2	Prosentase kematian ternak sapi potong di UPTD (1,5%)	1.1.2.2.2	Prosentase kematian ternak sapi potong di UPTD (1,5%)	1.1.2.2.2	Prosentase kematian ternak sapi potong di UPTD (1,5%)	1.1.2.2.2	Prosentase kematian ternak sapi potong di UPTD (1,5%)	1.1.2.2.2	Prosentase kematian ternak sapi potong di UPTD (1,5%)	1.1.2.2.2	Prosentase kematian ternak sapi potong di UPTD (1,5%)	1.1.2.2.2	Prosentase kematian ternak sapi potong di UPTD (1,5%)	1.1.2.2.2	Prosentase kematian ternak sapi potong di UPTD (1,5%)	1.1.2.2.2	Prosentase kematian ternak sapi potong di UPTD (1,5%)
1.1.2.2.2	Jumlah populasi ternak sapi perah	1.1.2.2.2	Prosentase kematian ternak sapi perah di UPTD (4%)	1.1.2.2.2	Prosentase kematian ternak sapi perah di UPTD (4%)	1.1.2.2.2	Prosentase kematian ternak sapi perah di UPTD (4%)	1.1.2.2.2	Prosentase kematian ternak sapi perah di UPTD (4%)	1.1.2.2.2	Prosentase kematian ternak sapi potong di UPTD (1,5%)	1.1.2.2.2	Prosentase kematian ternak sapi potong di UPTD (1,5%)	1.1.2.2.2	Prosentase kematian ternak sapi potong di UPTD (1,5%)	1.1.2.2.2	Prosentase kematian ternak sapi potong di UPTD (1,5%)	1.1.2.2.2	Prosentase kematian ternak sapi potong di UPTD (1,5%)	1.1.2.2.2	Prosentase kematian ternak sapi potong di UPTD (1,5%)	1.1.2.2.2	Prosentase kematian ternak sapi potong di UPTD (1,5%)	1.1.2.2.2	Prosentase kematian ternak sapi potong di UPTD (1,5%)	1.1.2.2.2	Prosentase kematian ternak sapi potong di UPTD (1,5%)	1.1.2.2.2	Prosentase kematian ternak sapi potong di UPTD (1,5%)
1.1.2.2.2	Jumlah populasi ternak sapi perah	1.1.2.2.2	Prosentase kematian ternak sapi perah di UPTD (4%)	1.1.2.2.2	Prosentase kematian ternak sapi perah di UPTD (4																								